

DISERTASI

**DINAMIKA INDUSTRIALISASI: TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN
DALAM MASYARAKAT ADAT PAPUA
(STUDI KASUS: SUKU KAMORO MIMIKA, PROVINSI PAPUA)**

Oleh
LIMI MOKODOMPIT
E043211001



**PROGRAM DOKTORAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



HALAMAN JUDUL

Dinamika Industrialisasi: Transformasi Kepemimpinan
Dalam Masyarakat Adat Papua
(Studi Kasus: Suku Kamoro Mimika, Provinsi Papua)

*Industrialization Dynamics: Leadership Transformation In Papua
Indigenous Society (Case Study: Kamoro Mimika Tribe, Papua Province)*

Oleh:
Limi Mokodompit
E043211001



PROGRAM DOKTORAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN PENGAJUAN

Dinamika Industrialisasi: Transformasi Kepemimpinan

Dalam Masyarakat Adat Papua

(Studi Kasus: Suku Kamoro Mimika, Provinsi Papua)

Diseratasi

Sebagai salah satu Syarat untuk Mencapai Gelar Doktor

Program Studi Doktor

Dususun dan diajukan oleh

Limi Mokodompit

E043211001

Kepada

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, disertasi berjudul “Dinamika Industrialisasi: Transformasi Kepemimpinan Dalam Masyarakat Adat Papua (Studi Kasus: Suku Kamoro Mimika, Provinsi Papua) adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing (Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, SU., sebagai Promotor dan Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si sebagai co-promotor-1 serta Dr. Mansyur Radjab, M.Si sebagai co-promotor-2). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dan penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka disertasi ini. Sebagian dari isi disertasi ini telah dipublikasikan di Jurnal :

1. Nama Jurnal : Africa Journal of Biological Science
Jurnal Terindeks : Scopus
Volume/Nomor : 6/S2
Status : Published
2. Nama Jurnal : International Journal of Qualitative Research
Jurnal Terakreditasi : Sinta 4
Volume/Nomor : 4/1

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa disertasi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, Juni 2024
Yang membuat
pernyataan

Limi Mokodompit
NIM E043211001



PRAKATA

Dengan rasa syukur yang tak terhingga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyelesaian disertasi ini. Proyek ini tidak akan menjadi kenyataan tanpa bantuan, dorongan, dan pengorbanan berbagai individu dan lembaga.

Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Jamaluddin Jompa, Ph.D.
 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si dan para pimpinan FISIP atas arahan dan motivasi untuk menyelesaikan studi ini.
 3. Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Prof. dr. Budu, Ph.D., Sp.M (K)., M.MedEd dan jajarannya atas pelayanan akademik yang diberikan.
 4. Ketua Departemen Sosiologi FISIP Unhas, Prof. Drs. Hasbi Marissangan, Ph.D atas bimbingan dan motivasi selama mengikuti proses akademik dan penelitian ini.
 5. Ketua Program Studi S3 Sosiologi FISIP Unhas Dr. Rahmat Muhammad, M.Si atas bimbingan dan arahan, baik dalam proses pembelajaran dalam kelas maupun selama bimbingan penelitian.
 6. Promotor, Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, SU; Co-Promotor, Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si. Co-Promotor Dr. Mansyur Radjab, M.Si, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas bimbingan, dukungan, dan dedikasi yang luar biasa selama proses penelitian saya. Sebagai promotor yang sangat terhormat, Bapak telah menjadi sumber inspirasi bagi saya sepanjang perjalanan akademik ini.
 7. Penguji, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus atas waktu dan dedikasi Ibu dalam menjalankan peran sebagai penguji dalam ujian saya. Kehadiran dan kontribusi ilmiah Ibu sangat berarti bagi perkembangan pengetahuan saya.
 8. Penguji, Prof. Drs. Hasbi Marissangan, M.Si., PhD. Dengan segala hormat yang terdalam, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas kesempatan sebagai penguji. Keberadaan Bapak tidak hanya memberikan arahan dan penilaian yang berharga, tetapi juga memberikan wawasan yang mendalam dalam bidang studi ini.
- Penguji, Dr. Rahmat Muhammad. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjalani ujian dan evaluasi disertasi saya. Saya sangat menghargai waktu, perhatian, dan pemikiran yang Bapak curahkan selama proses pengujian.



10. Para Dosen Sosiologi beserta staf yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu namun banyak memberi pengetahuan melalui diskusi dan dorongan semangat untuk menyelesaikan disertasi ini.
11. Para narasumber yang tertulis dalam disertasi ini, sangat luar biasa mendukung penulis melakukan penelitian dalam mengumpulkan bahan dan data yang dibutuhkan dalam penyusunan disertasi ini.
12. Untuk Almarhum Raden Mokodompit (Ayah): "Terima kasih, Ayah, atas segala pelajaran, kasih sayang, dan keteguhan yang telah Ayah berikan selama ini. Anda adalah teladan yang luar biasa bagi saya, dan saya akan selalu mengingat dan menghargai setiap momen yang telah kita lewati bersama. Semoga Ayah beristirahat dengan tenang di sisi-Nya."
13. Untuk Almarhumah Martini Mokodompit (Ibu): "Ibu, terima kasih atas cinta tanpa batas, perhatian, dan dukungan Ibu yang selalu mengalir dalam hidup saya. Anda adalah sumber inspirasi bagi saya, dan setiap kenangan bersama Ibu akan selalu menjadi harta berharga dalam hati saya. Semoga Almarhumah senantiasa mendapat tempat disisi Allah SWT."
14. Kepada istriku tercinta, Iryanti Suleha Uswanas, S.Sos, terima kasih atas segala dukungan, cinta, dan kesabaranmu selama studi saya. Tanpamu, saya tidak akan berhasil seperti ini. Setiap hari, kamu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi saya. Terima kasih atas pengorbanan dan doamu yang tak henti-hentinya. Aku sangat bersyukur memilikimu sebagai pendamping hidup dan sahabat sejati. Semoga Allah SWT memberikan rahmat keberkahan dan kasih sayang kepada keluarga.
15. Dengan tulus dan penuh rasa syukur, saya ingin mengungkapkan terima kasih kepada anak-anak saya, Moh. Yadly Y. Mokodompit, SE, M.Si., Agrian Novaldy Mokodompit, SH., dan Feramytha Tifani Mokodompit, SM, MBA, serta kepada cucu-cucu saya, Aroura Mokodompit, Alfarezy Mokodompit, dan Davin Mokodompit. Dukungan mereka tak tergantikan telah menjadi pendorong utama dalam perjalanan studi saya. Keberhasilan ini adalah hasil dari dedikasi dan dukungan mereka yang tanpa henti. Terima kasih atas doa, dukungan moral, dan cinta yang telah kalian berikan selama ini. Semoga kita terus menjadi sumber kebahagiaan dan dukungan satu sama lain dalam setiap perjuangan ke depan.



Dengan kerendahan hati, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada sahabat-sahabat terdekat saya yang telah memberikan dukungan luar biasa dalam perjalanan studi S3 ini. Terima kasih kepada Saksi Manoppo, SP., Rukman Korompot, SP., Renold Asmuruf, S.Sain, M.Si., dan Ramjam Mokoginta, SP.,

M.Si., atas dorongan, nasihat, dan bantuan yang tidak kenal lelah selama ini. Tanpa kehadiran dan dukungan mereka, saya tidak akan mencapai kesuksesan ini. Juga, tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moral dan materiil dalam perjalanan studi ini.

17. Tidak lupa, kepada responden dan partisipan penelitian, terima kasih atas waktu, energi, dan informasi yang mereka berikan. Tanpa kontribusi mereka, penelitian ini tidak akan mencapai kesuksesan yang telah diraih.

Akhirnya, kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa mengalir, saya haturkan rasa syukur yang dalam.

Makassar, Juni 2024

Penulis Disertasi

Limi Mokodompit



ABSTRAK

Limi Mokodompit E043211001: "DINAMIKA INDUSTRIALISASI: TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT ADAT PAPUA (STUDI KASUS: SUKU KAMORO MIMIKA, PROVINSI PAPUA)". Tim promotor, H.M. Tahir Kasnawi, Suparman Abdullah, Mansyur Radjab.

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dinamika industrialisasi dan transformasi kepemimpinan dalam masyarakat adat Papua, dengan fokus pada Suku Kamoro Mimika di Provinsi Papua, khususnya dalam konteks hubungan dengan PT Freeport.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalaminya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti tokoh adat, pemuda, perempuan, LSM, dan pemerintah di Suku Kamoro Mimika. Selain itu, observasi partisipatif dan analisis dokumen juga dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang dinamika kepemimpinan dan perubahan sosial di komunitas tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perubahan dalam pola kepemimpinan dan nilai-nilai masyarakat adat Mimika Papua tercermin dalam dampak kedatangan PT Freeport. Investasi perusahaan tersebut mengubah hierarki kepemimpinan tradisional, memperhitungkan pendidikan formal, serta mempengaruhi peran perempuan dalam pemilihan pemimpin adat. Pengambilan keputusan dan alokasi tanggung jawab juga bergeser dari konsensus ke pengaruh faktor eksternal. Hal ini menuntut keseimbangan antara tradisi dan tuntutan baru untuk mempertahankan identitas budaya dan kearifan lokal. Dalam konteks Kamoro Mimika, PT Freeport juga memengaruhi ekonomi dan pendidikan, mengubah struktur kepemimpinan seiring dengan peningkatan pendidikan. LSM, pemerintah, dan masyarakat adat harus bersatu untuk memastikan transformasi ini berlangsung adil dan memperkuat identitas budaya. Namun, masuknya PT Freeport juga mengubah nilai-nilai dan tradisi masyarakat adat, menggeser fokus dari harmoni dengan alam ke orientasi ekonomi dan teknologi modern, mempengaruhi pola hidup, struktur sosial, dan hubungan dengan lingkungan. Konflik terkait hak tanah dan dampak lingkungan semakin kompleks, menekankan perlunya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lingkungan serta keterlibatan LSM untuk memperjuangkan keadilan.

Kata kunci: Dinamika industrialisasi, Transformasi Keoemimpinan, PT Freeport



ABSTRACT

Limi Mokodompit E043211001: "INDUSTRIALIZATION DYNAMICS: LEADERSHIP TRANSFORMATION IN PAPUAN INDIGENOUS COMMUNITIES (CASE STUDY: KAMORO TRIBE, MIMIKA, PAPUA PROVINCE)". The research team, led by H.M. Tahir Kasnawi, Suparman Abdullah, Mansyur Radjab, aims to explore the industrialization dynamics and leadership transformation within Papua's indigenous communities, focusing on the Kamoro Tribe in Mimika, Papua Province, particularly in relation to PT Freeport. Employing a qualitative approach, the study conducted in-depth interviews with various stakeholders, including tribal leaders, youth, women, NGOs, and government officials in the Kamoro Tribe. Additionally, participatory observation and document analysis were employed to gain a holistic understanding of leadership dynamics and social change within the community. The findings reveal that PT Freeport's presence in Mimika, Papua, has significantly altered the leadership transformation of the Kamoro indigenous community. Traditional selection of tribal leaders, previously rooted in customs, is now influenced by external factors such as economic support and affiliation with the company, obscuring the authentic values of the selection process. Decision-making, once consensus-based and guided by tribal customs, is often supplanted by expedited decisions driven by economic needs and corporate pressures. Moreover, there is a noticeable shift in responsibilities, with traditional roles focused on cultural preservation now eclipsed by economic opportunities offered by PT Freeport, reflecting profound changes in the social and cultural dynamics of the Kamoro indigenous community.

Keywords: Industrialization dynamics, Leadership transformation, PT Freeport



LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**DINAMIKA INDUSTRIALISASI: TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN
DALAM MASYARAKAT ADAT PAPUA (STUDI KASUS: SUKU
KOMORO MIMIKA PROVINSI PAPUA)**

Disusun dan diajukan oleh

LIMI MOKODOMPIT

E043211001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 13 Juni 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Promotor,

Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU.
NIP 194809131978031001

Ko - Promotor I

Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si.
NIP 196807151994031004

Ko - Promotor II

Dr. Mansyur Radjab, M.Si.
NIP 195807291984031003

Ketua Program Studi
Sosiologi,

Dr. Rahmat Muhammad, M.Si.
NIP 197005131997021002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si
NIP 197508181008011008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PENGESAHAN DISERTASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latarbelakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.4.1 Manfaat praktis	17
1.4.2 Manfaat teoritis	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Konsep dan Teori Perubahan Sosial	20
2.2 Konsep Industrialisasi	23
2.3 Konsep Transformasi.....	27
2.4 Konsep Modernisasi.....	39
2.5 Kepemimpinan dan Kepemimpinan Adat	48
2.6 Kepemimpinan Tradisional dan Modern	56
2.7 Kelembagaan dan Kelembagaan Lokal	60
2.8 Konsep Kelas Menengah (Middle Class)	73
2.9 Penelitian Terdahulu	79
2.10 Kerangka Pemikiran	89
BAB III METODE PENELITIAN.....	92
3.1 Strategi Dan Pendekatan Penelitian.....	92
3.1.1 Strategi Penelitian	92
3.1.2 Pendekatan Penelitian.....	93
3.2 Forman Penelitian	94
3.2.1 Profil Informan	94



3.4 Teknik Pengumpulan Data	101
3.4.1 Wawancara Mendalam:.....	102
3.4.2 Observasi	102
3.4.3 Analisis Dokumen:.....	103
3.4.4 Focus Group Discussion (FGD):	104
3.5 Pengolahan dan Analisa Data	104
3.5.1 Koleksi Data (Data Collection).....	104
3.6 Pengecekan Keabsahan Data	106
3.7 Tahap-tahap Penelitian	107
3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian	109
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	112
4.1 Kabupaten Mimika dan Masyarakat Adat Kamaro	112
4.1.1 Geografi Dan Iklim.....	112
4.1.2 Administrasi Pemerintahan.....	113
4.1.3 Keadaan Penduduk.....	115
4.1.4 Kondisi Sosial Ekonomi.....	117
4.1.5 Kondisi sosial-budaya.....	122
4.2 Sejarah PT. Freeport Indonesia	129
Ekspedisi.....	130
PTFI di Masyarakat	132
BAB V POLA TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN MASYARAKAT ADAT KAMORO MIMIKA	133
5.1 Perubahan dalam struktur hierarki kepemimpinan tradisional	134
5.2 Bentuk dan Cara Pemilihan Pemimpin	143
5.3 Perubahan dalam cara pengambilan keputusan dan pembagian tanggung jawab	155
BAB VI FAKTOR-FAKTOR PENGARUH TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN PADA MASYARAKAT ADAT KAMARO MIMIKA ...	167
6.1 Faktor ekonomi	168
6.2 Faktor pendidikan	177
Faktor Kelas menengah (Middle Class)	194
INTERAKSI TRADISI DAN MODERNITAS DALAM KONTEKS MASYARAKAT ADAT KAMARO MIMIKA	204
Perubahan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat adat.	205



7.2 Integrasi teknologi dan elemen modern dalam praktik-praktik tradisional.	211
7.3 Dampak Adopsi Teknologi Dalam Kehidupan Sehari-Hari	215
7.4 Implikasi Teoritis Dilihat Dari Perspektif Perubahan Sosial ...	223
7.5 Proposisi	225
BAB VIII PENUTUP	226
8.1 Kesimpulan	226
8.2 Rekomendasi Kebijakan:	228
DAFTAR PUSTAKA	231
LAMPIRAN	239



DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal.
(1)	(2)	(3)
4.1	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Mimika, 2018–2022	114
4.2	Luas Daerah dan Persentase Terhadap Luas Provinsi Menurut Kecamatan Kabupaten Mimika 2022	115
4.3	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Kepadatan per km ² , dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Di Kabupaten Mimika, 2022	116
4.4	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mimika, 2021	118
4.5	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Mimika, 2020	119
4.6	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mimika, 2021	120
4.7	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mimika, 2021	122
4.8	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Mimika, 2019/2020	124
4.9	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mimika, 2019 dan 2020	125
4.10	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Mimika, 2013–2020 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Mimika, 2013–2020	128



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Halaman
(1)	(2)	(3)
2.1	Gambar Skema Kerangka Pikir	91
3.1	Jadwal Waktu Penelitian	111
4.1	Peta Adminsitration Kabupaten Mimika Papua Tengah	113



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Keterangan	Halaman
(1)	(2)	(3)
1	Pedoman Wawancara	239
2	Profil Informan	245
3	Struktur Pemerintahan Dan Kelembagaan Adat Kampung Keakwa Salah Satu Rumpun Suku Kamaro	246
4	Kondisi Permukiman Penduduk dan Lingkungan Masyarakat Adat Kamaro Mimika Papua	247



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Suku bangsa Mimika-Kamoro telah mengakar sejak zaman kolonial Belanda di Tanah Papua, terutama di kawasan selatan atau barat daya. Sejarah kebudayaan mereka mencatat bahwa asal-usul Suku Mimika-Kamoro berasal dari arah mata air, yang menandakan perpindahan dari utara tempat tinggal mereka saat ini. Hal ini diperkuat oleh perpindahan kampung dari mata air ke arah pantai. Kehidupan dan kebudayaan mereka tercermin dalam prinsip tiga S: sagu, sampan, dan sungai, yang telah menjadi fokus kehidupan mereka sejak masa leluhur hingga saat ini. Namun, pergeseran orientasi terjadi, terutama di kawasan Wania atau Hiripau, dimana kehidupan kota-kampung menjadi lebih dominan. Meskipun fokus kebudayaan tiga S masih dipegang teguh oleh para perempuan Mimika-Kamoro, namun orientasi para laki-laki dan anak-anak telah beralih ke arah kehidupan kota-kampung sebagai kawasan ini menjadi titik hubungan antara Kota Timika dan Pelabuhan Poumako.

Menurut Sutarga, yang dikutip oleh Usmany (2013), orang Mimika merujuk kepada komunitas yang berada di dataran rendah, yang meliputi wilayah pantai barat-daya Pulau Irian dengan koordinat $134^{\circ} 59'$ BT hingga $136^{\circ} 10'$ BT, atau dari tepi sebelah timur Teluk Etna hingga sungai Otokwa. Di sebelah utara ini terbatas di sebelah utara oleh Pegunungan Charles Louis, yang puncaknya menjorok ke laut di sungai Opa. Di sebelah timur



lautnya terdapat Pegunungan Cartenz, yang ketika cuaca cerah, puncak-puncaknya yang bersalju dapat dengan jelas terlihat di muara sungai Otokwa. Sebagai batas selatannya adalah Laut Arafuru.

Masyarakat Kamaro tidak dapat dipisahkan dari hubungannya dengan alam. Alam merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka, menjadi sumber utama kebutuhan dan perlindungan. Mereka hidup dalam harmoni dengan alam, menjaga solidaritas dan persatuan budaya yang kokoh. Dalam mencari nafkah dan melindungi diri, mereka saling bergantung dan saling menjaga satu sama lain. Dengan menggunakan bahasa yang sama, kelompok suku Kamoro dapat memperkuat ikatan persaudaraan mereka, mempertahankan gaya hidup tradisional mereka, terutama di tengah tantangan globalisasi yang terus mengancam.

Di Kabupaten Mirnika, keberagaman suku menjadi salah satu ciri khas yang memengaruhi pola hunian dan kehidupan masyarakat. Terdapat dua kelompok suku besar yang mendominasi, yakni Suku Amugme dan Suku Mimika-Kamoro, yang hidup secara berbeda sesuai dengan wilayah tempat tinggal mereka. Suku Amugme cenderung menempati beragam ketinggian, mulai dari dataran rendah hingga tinggi. Di sisi lain, Suku Mimika-Kamoro, secara mayoritas, mendiami daerah dataran rendah, terutama di sepanjang pesisir pantai dan di tepi sungai serta rawa yang dekat dengan sumber mata pencaharian tradisional mereka. Pola hunian ini mencerminkan adaptasi



ku tersebut terhadap lingkungan alam dan sumber daya yang di sekitarnya, serta mencerminkan hubungan yang erat antara

kehidupan sehari-hari dan geografi lokal.

Di kampung Hiripau, yang terletak di zona ekologi rawa dan muara pantai, Etnis Kamaro menjalankan kehidupan mereka dengan meramu sagu sebagai pekerjaan utama. Dalam dusun-dusun sagu yang dimiliki oleh taparu, proses meramu sagu menjadi kegiatan yang melibatkan baik laki-laki maupun perempuan. Pembagian kerja terjadi di antara mereka, di mana laki-laki bertanggung jawab untuk tahapan awal seperti menebang pohon sagu, menguliti batang pohon sagu, dan menokok sagu menjadi serat-serat. Setelah itu, perempuan mengambil alih untuk memproses serat-serat tersebut guna menghasilkan tepung sagu yang merupakan saripati utama dari proses tersebut. Dengan demikian, melalui pembagian kerja yang terorganisir, komunitas Etnis Kamaro di kampung Hiripau menjaga keberlangsungan dari aktivitas meramu sagu yang vital bagi kehidupan mereka.

Di kampung Hiripau, mencari ikan, kepiting, dan siput di hutan-hutan bakau bukan hanya sekadar mata pencaharian, tetapi juga bagian penting dari kehidupan sehari-hari, selain meramu sagu. Kegiatan ini terjadi karena masyarakat kampung tersebut tinggal di wilayah dekat pesisir pantai dan juga rawa atau hutan bakau. Selain itu, mata pencaharian lain yang umum dilakukan adalah berkebun atau bercocok tanam, yang menjadi sumber kehidupan utama bagi mereka. Praktik berkebun ini cukup umum dilakukan



ah yang digunakan untuk bercocok tanam bisa dimiliki secara atau bersama oleh masyarakat kampung. Dengan demikian,

mencari sumber makanan dari laut dan melalui pertanian menjadi dua aspek penting dalam menopang kehidupan masyarakat di kampung Hiripau.

Dalam mengeksplorasi kaya sejarah dan budaya Kampung Mioko, yang sekarang dikenal sebagai Kampung Kamora, tidak dapat dilepaskan dari narasi tentang Mayoritas Suku Kamoro. Masyarakat Kampung Kamora terdiri dari tiga taparu: Taparu Mbaca, Taparu Iwuka, dan Taparu Burpapimbra. Sebelum menetap di kampung ini, leluhur mereka hidup sebagai kelompok nomaden, terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah mereka, mulai dari konflik sosial, wabah penyakit, hingga kepercayaan dan mitos yang turut membentuk identitas mereka. Dalam perjalanan sejarah mereka, para leluhur membangun pemukiman berdasarkan kepemilikan hak ulayat masing-masing taparu, yang kemudian dikenal sebagai Kampung Lama. Menariknya, walaupun telah mengalami sembilan kali perpindahan, masyarakat adat Kampung Kamora menunjukkan ketahanan dan fleksibilitas budaya mereka dalam menghadapi perubahan lingkungan dan sosial, menjadikan perjalanan mereka sebagai cerminan dari adaptasi dan keberlanjutan budaya yang luar biasa.

Sejak zaman dahulu, masyarakat adat Kampung Kamora telah memelihara warisan pengelolaan wilayah adat yang diteruskan dari leluhur



Wilayah ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber kebutuhan ari, tetapi juga merupakan cerminan dari identitas dan jati diri

kolektif masyarakat adat tersebut. Kedua aspek ini, yakni pengelolaan wilayah adat dan identitasnya, memainkan peran integral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat Kamora. Hingga saat ini, hubungan yang erat terjaga antara masyarakat adat dengan aturan dan norma adat yang mengatur pengelolaan wilayah mereka. Ini mencerminkan kesinambungan budaya dan keberlanjutan tradisi yang masih dijaga dan dihormati oleh generasi saat ini.

Masyarakat adat Kamoro, yang telah lama mengatur dan membagi wilayah pemanfaatan sumber daya alam, mendasarkan sistem ini pada prinsip warisan nenek moyang mereka. Prinsip pembagian ini, yang terwariskan secara turun-temurun, tidak hanya berlaku bagi taparu dan sub taparu, tetapi juga mencakup hingga tingkat marga. Dalam kerangka ini, dusun sagu menonjol sebagai fokus utama, berperan krusial dalam penyediaan makanan pokok sehari-hari bagi komunitas adat di Kampung Kamora. Pengelolaan dusun sagu tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, melainkan dilakukan secara kolektif oleh kelompok tingkatan marga. Hal ini merupakan bagian integral dari sistem kepemilikan tiga taparu besar: Taparu Mbacka, Taparu Iwuka, dan Taparu Burpapimbra. Dengan demikian, praktik-praktik tradisional ini tidak hanya mengatur pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan keberlanjutan ekologis dalam masyarakat adat Kamoro.



alam pengelolaan sumber daya alam, masyarakat adat Kampung di Mimika Papua telah mengembangkan sistem aturan turun-

temurun yang menjadi pondasi bagi keberlangsungan hidup mereka. Aturan-aturan ini membentuk kerangka kerja yang mencakup kepemilikan hak ulayat dan penggunaan sumber daya alam, yang dibagi secara adil berdasarkan wilayah kepemilikan masing-masing taparu. Setiap taparu memiliki wilayah kepemilikan yang mencakup berbagai ekosistem, termasuk muara, pesisir, dan pegunungan. Batas-batas wilayah ini ditetapkan dengan menggunakan referensi alam, seperti sungai besar, anak sungai, atau pohon kelapa yang ditanam secara sengaja sebagai penanda batas. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, mempertimbangkan kebutuhan hidup mereka serta menjaga keseimbangan ekologis di lingkungan mereka.

Masyarakat adat yang tergabung dalam tiga taparu besar, yaitu Taparu Mbaca, Taparu Iwuka, dan Taparu Burpampimbra, memiliki sistem peraturan yang sangat terorganisir dalam mengelola sumber daya alam yang mereka kelola. Mereka memahami dengan baik hak dan kewajiban mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam yang meliputi larangan untuk melanggar batas wilayah dusun dalam berbagai aktivitas seperti memanen sagu, berburu, atau mengambil kayu. Penegakan aturan ini sangat ketat, karena pelanggaran terhadap aturan dapat mengakibatkan konsekuensi serius, bahkan sampai pada pengalaman penyakit, dengan



enyembuhan yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik dusun yang kutan.

Tradisi ini juga menetapkan peran penting bagi Ndati, yang bertindak sebagai juru bicara dan mediator antara taparu dalam menyelesaikan konflik terkait pengelolaan dusun. Kehadiran Ndati sangat diharapkan untuk mengurangi pelanggaran wilayah dan mempertahankan perdamaian antara taparu. Di samping itu, tradisi ini juga mencakup konsep Sasi yang merupakan instrumen penting dalam mengatur penggunaan sumber daya alam dalam jangka waktu tertentu. Melalui Sasi, mereka memberlakukan larangan eksploitasi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, menunjukkan komitmen mereka terhadap pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem yang merupakan nilai sentral dalam budaya dan kehidupan mereka.

Sistem aturan dan norma yang diterapkan di Kampung Kamora bukan hanya berfungsi sebagai panduan dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga membentuk kerangka sosial yang kuat yang mengikat seluruh masyarakat adat. Norma-norma ini, yang dijaga dan dipertahankan oleh para tetua adat, bukan sekadar prinsip-prinsip yang tercatat, tetapi juga nilai-nilai yang terus hidup dan berfungsi sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mereka tidak hanya memastikan kesinambungan budaya, tetapi juga menciptakan harmoni sosial yang fundamental dalam komunitas adat tersebut. Keberadaan sistem aturan dan norma ini menandai kekuatan dan keberlanjutan dari struktur sosial dan



Kampung Kamora, memastikan bahwa tradisi dan nilai-nilai yang ia dijunjung tinggi tetap terjaga dan relevan di masa kini.

Masuknya PT Freeport ke wilayah Papua, terutama di daerah Mimika, telah memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat suku Kamaro. Sebelumnya, masyarakat suku Kamaro hidup secara tradisional dengan pola kehidupan yang berkelanjutan, bergantung pada mata pencaharian seperti berburu, bertani, dan mengumpulkan hasil hutan. Namun, kehadiran PT Freeport membawa perubahan besar dalam pola hidup mereka. Perusahaan ini membawa dengan dirinya industri tambang yang memanfaatkan sumber daya alam Papua, terutama tambang emas dan tembaga.

Meskipun PT Freeport menyediakan peluang pekerjaan bagi sebagian masyarakat lokal, dampaknya terhadap kehidupan suku Kamaro tidak selalu positif. Eksploitasi sumber daya alam yang besar menyebabkan perubahan lingkungan yang signifikan, termasuk deforestasi, polusi air, dan kerusakan ekosistem yang memengaruhi mata pencaharian tradisional masyarakat Kamaro. Selain itu, modernisasi dan urbanisasi yang terjadi akibat kehadiran perusahaan tambang juga telah mengubah struktur sosial dan budaya mereka.

Adapun hubungannya dengan kehidupan masyarakat suku Kamaro, masuknya PT Freeport telah memicu berbagai perubahan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meskipun ada manfaat ekonomi dari kesempatan kerja dan pembangunan infrastruktur, konsekuensinya terhadap lingkungan dan

an tradisional suku Kamaro seringkali menjadi sumber etujuan dan konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat



lokal. Masyarakat suku Kamaro, dalam menanggapi hadirnya PT Freeport, harus berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan hak-hak mereka sambil beradaptasi dengan perubahan yang ditimbulkan oleh industrialisasi dan globalisasi.

Dalam konteks industrialisasi, perubahan ini tidak hanya mencakup transformasi fisik, tetapi juga transformasi dalam struktur sosial dan kepemimpinan, yang membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai budaya dan tradisi yang masih menjadi landasan kuat bagi masyarakat adat ini.

Hasil penelitian Kemon (2015) menunjukkan bahwa sejak zaman kuno hingga sekarang, umumnya suku Kamoro dan khususnya desa Tipuka, hidup mereka sangat bergantung pada alam. Ketergantungan dan kelangsungan hidup mereka tidak lepas dari tiga elemen, yang secara lokal disebut sagu, sampan, dan sungai (3S). Pengetahuan tentang budaya mempengaruhi kesadaran komunitas perikanan Kamoro dalam meningkatkan standar hidup mereka yang seharusnya lebih baik, namun kenyataannya kurang. Mereka terkadang menjual bantuan perikanan yang disediakan oleh PTFI karena berbagai alasan. Beberapa di antaranya menjual motor tempel kepada pengusaha untuk membeli kebutuhan pokok.

Proses industrialisasi di Papua tidak hanya menciptakan pergeseran ekonomi, tetapi juga mengubah pola pemukiman, tata ruang, dan hubungan



masyarakat lokal dengan pemerintah serta perusahaan pengelola daya alam. Pada tingkat makro, dampak industrialisasi tampak

dalam pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah, namun di sisi lain, terdapat risiko terkait dengan kerusakan lingkungan, degradasi tanah, dan konflik sumber daya. Suku Kamoro Mimika, sebagai kelompok masyarakat adat yang hidup di tengah-tengah dinamika ini, mengalami perubahan dalam pola hidup mereka, termasuk sistem kepemimpinan tradisional.

Dalam masyarakat adat Papua, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan urusan politik, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan, budaya, dan kesejahteraan komunitas. Industrialisasi memberikan tekanan pada struktur tradisional ini, dengan memperkenalkan dinamika baru seperti migrasi penduduk, pertumbuhan urbanisasi, dan adopsi gaya hidup yang berbeda. Studi kasus Suku Kamoro Mimika akan membahas bagaimana kepemimpinan dalam masyarakat adat berevolusi dalam menghadapi tantangan industrialisasi, termasuk peran tokoh-tokoh adat, adaptasi kebijakan lokal, dan integrasi nilai-nilai tradisional dengan tuntutan pembangunan ekonomi modern.

Salah satu perhatian utama adalah perubahan dalam pola kehidupan ekonomi dan sosial yang dibawa oleh industrialisasi dapat mengubah cara hidup tradisional. Masyarakat adat sering kali tergantung pada pola-pola subsisten yang berkelanjutan dan memiliki dampak minimal terhadap lingkungan. Peralihan cepat menuju ekonomi uang dan gaya hidup modern dapat memunculkan tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan sosial



daya, termasuk penurunan praktik-praktik tradisional dan huan lokal.

Sementara dari aspek transformasi kepemimpinan masyarakat adat di Papua menjadi sebuah fokus penting dalam menghadapi dinamika industrialisasi. Perubahan ekonomi yang cepat dan tekanan dari pembangunan modern menciptakan tantangan bagi sistem kepemimpinan tradisional, termasuk di Suku Kamoro Mimika. Tradisi kepemimpinan masyarakat adat di Papua sering kali mencakup peran tokoh-tokoh adat yang memegang kendali atas aspek-aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari urusan politik hingga tata nilai budaya.

Dalam konteks industrialisasi, perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial memaksa masyarakat adat untuk menyesuaikan sistem kepemimpinannya. Terdapat pergeseran dalam tanggung jawab pemimpin tradisional, yang harus beradaptasi dengan tuntutan pembangunan ekonomi modern. Pemimpin tradisional yang sebelumnya fokus pada pengaturan kehidupan komunitas sekarang dihadapkan pada tantangan baru, termasuk penanganan konflik dengan perusahaan industri, perubahan pola pemukiman akibat urbanisasi, dan perubahan dalam struktur sosial.

Di sisi lain, beberapa pemimpin masyarakat adat di Papua juga melihat peluang dalam transformasi ini. Mereka dapat berperan sebagai perantara antara masyarakat tradisional dan pihak-pihak eksternal seperti perusahaan atau pemerintah. Pemimpin yang mampu menggabungkan



di tradisional dengan pemahaman tentang dinamika modern dapat kunci untuk meredakan konflik dan memfasilitasi pembangunan

yang lebih inklusif.

Transformasi kepemimpinan juga mencakup peran perempuan dalam konteks masyarakat adat. Di tengah perubahan peran ekonomi dan sosial, perempuan mungkin mengalami pergeseran dalam peran dan tanggung jawab mereka. Dengan demikian, transformasi kepemimpinan tidak hanya mencakup dimensi maskulin, tetapi juga perlunya memahami perubahan-perubahan dalam peran perempuan dalam kehidupan masyarakat adat.

Dalam menjawab tantangan ini, studi kasus Suku Kamoro Mimika dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana transformasi kepemimpinan terjadi dalam konteks masyarakat adat Papua. Menilai peran tokoh-tokoh adat, adaptasi kebijakan lokal, dan strategi pemimpin masyarakat adat untuk menjaga nilai-nilai tradisional di tengah arus industrialisasi dapat menjadi kontribusi berharga dalam pemahaman tentang kompleksitas transformasi kepemimpinan di Papua.

Dalam beberapa kasus, transformasi kepemimpinan mencakup upaya untuk memodernisasi struktur kepemimpinan tradisional. Pemimpin masyarakat adat mungkin perlu mengembangkan keterampilan manajemen, diplomasi, dan advokasi untuk efektif berinteraksi dengan pihak-pihak eksternal, seperti perusahaan atau pemerintah. Di sisi lain, terdapat juga upaya untuk mempertahankan keaslian kepemimpinan tradisional, dengan pemimpin adat berupaya memadukan nilai-nilai leluhur

tuntutan modern.

ran pendidikan juga menjadi kunci dalam transformasi



kepemimpinan masyarakat adat. Mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan baru sekaligus memahami dan menghormati nilai-nilai tradisional dapat membentuk pemimpin-pemimpin masa depan yang dapat membawa perubahan positif. Pendidikan lokal yang memasukkan unsur-unsur budaya masyarakat adat dapat menjadi sarana untuk meneruskan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan tradisional.

Relevan dengan tulisan Umanilo (2019) tentang “Struktur Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Industri” bahwa, masyarakat yang ada di kawasan industri terdiri dari beberapa unsur elemen sosial yang terbentuk karena adanya perkembangan sebuah proses industrialisasi. Permasalahan yang muncul di dalam lingkungan masyarakat industri antara lain: hubungan atau interaksi antara atasanpekerja buruh-masyarakat sekitar pabrik, adanya perubahan-perubahan yang diakibatkan kehadiran bangunan-bangunan pabrik yang berada disekitar masyarakat baik yang bersifat sosial, budaya, ekonomi hingga pengaruh perkembangan yang mengarah pada pemahaman atas sifat yang materialistik. Imbas dari adanya proses industrialisasi tidak terlepas dari adanya permasalahan-permasalahan yang cenderung mengarah pada kecemburuan-kecemburuan sosial, baik yang bersifat materialistik maupun yang diakibatkan dari adanya hubungan atau interaksi yang tidak harmonis dari setiap unsur elemen yang ada di masyarakat industri dalam bentuk distorsi-



osial yang mana menurut penulis hal itu dinamakan sebagai konflik masyarakat industri.

Aspek penting lainnya dari penelitian ini adalah perlunya memaknai dari aspek pembangunan berkelanjutan yang dapat memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi dampak industrialisasi secara holistik, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara teoritis, ini menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Dalam konteks Papua, di mana sumber daya alam dan nilai-nilai tradisional sangat penting, hal ini dapat membantu memandu upaya pembangunan yang berkelanjutan dan memperhitungkan keberlanjutan budaya masyarakat adat (Sachs, 2015).

Rationale penelitian ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk memahami dampak industrialisasi terhadap kehidupan masyarakat adat, khususnya di Provinsi Papua dengan fokus pada suku Kamoro Mimika. Proses industrialisasi, yang sering kali diiringi oleh modernisasi ekonomi dan infrastruktur, memiliki potensi untuk mengubah secara mendalam dinamika sosial dan budaya masyarakat adat. Keberlanjutan kehidupan tradisional dan nilai-nilai budaya suku Kamoro Mimika mungkin terancam oleh perubahan ini, dan penelitian ini diinisiasi untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana transformasi kepemimpinan dan identitas budaya berjalan seiring dengan arus industrialisasi.

Masyarakat adat Papua telah lama mempertahankan sistem sosial yang kaya dengan nilai-nilai tradisional, yang mencakup struktur kepemimpinan yang unik dan erat terkait dengan lingkungan sekitar. Dengan masuknya industri, terutama di wilayah-wilayah seperti Papua yang



kaya akan sumber daya alam, pertanyaan muncul tentang bagaimana nilai-nilai ini berinteraksi dengan dinamika ekonomi modern. Pemahaman mendalam tentang perubahan ini menjadi krusial, terutama karena dapat memberikan panduan bagi kebijakan yang berkelanjutan dan menghormati hak-hak masyarakat adat.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tidak hanya dampak ekonomi dari industrialisasi di suku Kamoro Mimika tetapi juga bagaimana perubahan ini membentuk kembali dinamika sosial dan kelembagaan, khususnya dalam hal kepemimpinan tradisional. Rationale penelitian juga muncul dari kesadaran akan potensi konflik antara nilai-nilai tradisional dan modernitas ekonomi yang seringkali menjadi ciri khas proses industrialisasi.

Selain itu, penelitian ini dapat memberikan dasar bagi pembuatan kebijakan yang lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat adat, yang sering kali menghadapi tantangan ketika harus menavigasi antara tuntutan ekonomi modern dan pelestarian warisan budaya mereka. Dengan merinci transformasi kepemimpinan dalam studi kasus suku Kamoro Mimika, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis untuk mengembangkan strategi kebijakan yang berwawasan ke depan, memastikan bahwa keberlanjutan budaya dan nilai-nilai masyarakat adat tidak terkompromi oleh dampak industrialisasi yang tak terelakkan.



ngan demikian maka sebagai permasalahan umum dalam penelitian ialah “BAGAIMANA TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN

MASYARAKAT ADAT DITENGAH PROSES INDUSTRIALISASI PADA SUKU KAMORO MIMIKA PAPUA”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola transformasi dalam kepemimpinan masyarakat adat Papua, khususnya pada Suku Kamoro Mimika di Provinsi Papua?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi kepemimpinan di tengah proses industrialisasi pada masyarakat adat Papua, terutama dalam konteks Suku Kamoro Mimika?
3. Bagaimana interaksi antara tradisi dan modernitas memengaruhi dinamika sosial dan struktur kepemimpinan dalam masyarakat adat Papua, dengan fokus pada transformasi yang dialami oleh Suku Kamoro Mimika dalam menghadapi industrialisasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dinamika industrialisasi berkontribusi terhadap pola transformasi dalam kepemimpinan masyarakat adat Papua, khususnya pada Suku Kamoro Mimika di Provinsi Papua?
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi kepemimpinan di tengah proses industrialisasi pada masyarakat adat Papua, terutama dalam konteks Suku Kamoro Mimika?
3. Menganalisis interaksi antara tradisi dan modernitas memengaruhi dinamika sosial dan struktur kepemimpinan dalam masyarakat adat



Papua, dengan fokus pada transformasi yang dialami oleh Suku Kamoro Mimika dalam menghadapi industrialisasi?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat praktis

1. **Pemahaman Lebih Mendalam:** Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika industrialisasi di Papua, khususnya di kalangan Suku Kamoro Mimika. Pemahaman ini dapat menjadi landasan bagi pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, perusahaan, dan lembaga pengembangan, untuk merancang kebijakan dan program yang lebih sesuai dengan konteks lokal.
2. **Panduan untuk Pengambilan Keputusan:** Hasil penelitian dapat memberikan panduan konkret bagi pengambil keputusan di tingkat lokal maupun nasional. Informasi ini dapat membantu dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih efektif, meminimalkan dampak negatif, dan memaksimalkan manfaat positif bagi masyarakat adat dan lingkungan.
3. **Pemberdayaan Masyarakat:** Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih baik kepada masyarakat adat tentang transformasi yang terjadi di sekitar mereka dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Ini dapat memberikan landasan bagi program pemberdayaan masyarakat,



termasuk pelatihan dan pendidikan, untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat.

1.4.2 Manfaat teoritis

1. **Kontribusi Terhadap Teori Kepemimpinan:** Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur kepemimpinan dengan menggali bagaimana kepemimpinan tradisional beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi transformasi ekonomi dan sosial yang cepat. Hal ini dapat memperkaya teori kepemimpinan dengan konteks yang lebih lokal dan spesifik.
2. **Pengembangan Konsep Keberlanjutan Budaya:** Studi kasus ini dapat membantu dalam pengembangan konsep keberlanjutan budaya dalam konteks industrialisasi. Pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana masyarakat adat menjaga dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya mereka dalam menghadapi transformasi ekonomi dapat memberikan sumbangan penting bagi literatur keberlanjutan budaya.
3. **Perumusan Kebijakan yang Lebih Akurat:** Penelitian ini dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih akurat dan berkelanjutan di Papua. Kebijakan ini dapat mempertimbangkan dampak industrialisasi pada masyarakat adat serta langkah-langkah perlindungan dan pelestarian budaya.



4. Penyusunan Rencana Pembangunan Berkelanjutan: Hasil penelitian dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam menyusun rencana pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan begitu, pembangunan dapat berlangsung sejalan dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal.
5. Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Eksternal: hasil penelitian ini dapat membantu pihak eksternal, seperti perusahaan dan lembaga donor internasional, untuk lebih memahami konteks lokal. Hal ini dapat memfasilitasi kerjasama yang lebih efektif dan berkelanjutan antara pihak eksternal dengan masyarakat adat dan pemerintah daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Teori Perubahan Sosial

Konsep perubahan sosial merujuk pada transformasi dalam struktur, budaya, dan norma-norma yang terjadi dalam suatu masyarakat dari waktu ke waktu. Ini melibatkan pergeseran dalam nilai-nilai, keyakinan, perilaku, dan institusi sosial yang membentuk pola-pola kehidupan masyarakat. Perubahan sosial bisa bersifat lambat atau cepat, terjadi secara bertahap atau mendadak, dan dipicu oleh berbagai faktor seperti teknologi, ekonomi, politik, dan budaya. Proses perubahan sosial ini dapat diamati dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara berinteraksi sosial, pola konsumsi, hingga struktur keluarga dan organisasi politik. Penting untuk dipahami bahwa perubahan sosial bersifat kompleks dan tidak selalu merata di seluruh masyarakat, kadang-kadang memunculkan konflik atau resistensi dari kelompok-kelompok tertentu yang merasa terancam oleh perubahan tersebut.

Menurut Anwar (2007), bahwa perubahan sosial adalah sebagai fenomena yang kompleks dan fundamental dalam dinamika masyarakat. Anwar menyajikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami berbagai aspek perubahan sosial, mulai dari faktor-faktor internal seperti nilai, norma, dan institusi, hingga pengaruh eksternal seperti globalisasi dan

i. Melalui pendekatan ini, pembaca diajak untuk memahami bahwa perubahan sosial tidak hanya memengaruhi struktur



masyarakat, tetapi juga membentuk identitas, nilai, dan interaksi sosial. Anwar juga membahas konflik sebagai salah satu hasil dari perubahan sosial, serta peran agen perubahan seperti gerakan sosial dan elit dalam memicu atau menanggapi perubahan tersebut. Dengan bahasa yang jelas dan analisis yang mendalam, buku ini memberikan wawasan yang berharga bagi pembaca yang tertarik untuk memahami dinamika perubahan sosial dalam konteks masyarakat modern.

Dalam bukunya yang berjudul "Sosiologi Perubahan Sosial," Soemardjan (1994) menggambarkan perubahan sosial dari perspektif sosiologis. Soemardjan menyajikan analisis yang mendalam tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat, termasuk faktor ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Dia menguraikan teori-teori sosiologi yang berhubungan dengan perubahan sosial, seperti teori konflik, fungsionalisme, dan interaksi simbolik, serta menerapkan teori-teori tersebut dalam konteks kasus-kasus perubahan sosial yang ada. Melalui pendekatan ini, Soemardjan membantu pembaca memahami kompleksitas dan dinamika perubahan sosial dalam masyarakat, serta pentingnya pemahaman terhadap peran berbagai faktor dalam membentuk arah dan karakter perubahan tersebut.

Dalam bukunya yang berjudul "Perubahan Sosial: Kajian Sejarah dan Prospektif", Surbakti (2002), menyajikan analisis yang mendalam tentang



perubahan sosial dari dua perspektif utama: sejarah dan prospektif. menguraikan bagaimana perubahan sosial merupakan fenomena

yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, politik, ekonomi, dan budaya. Melalui pendekatan sejarah, buku ini mengulas berbagai peristiwa penting yang telah membentuk arah perubahan sosial dalam masyarakat, menggambarkan bagaimana masyarakat berevolusi dari masa ke masa. Di sisi lain, perspektif prospektif memandang perubahan sosial sebagai tantangan dan peluang bagi pembangunan masa depan, dengan menyoroti strategi dan kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk mengelola perubahan tersebut secara efektif. Dengan demikian, buku ini tidak hanya menyajikan pemahaman tentang perubahan sosial sebagai suatu fenomena, tetapi juga menawarkan wawasan yang relevan dan praktis bagi pembaca yang tertarik dalam studi perubahan sosial dan pembangunan masyarakat.

Kesimpulan dari ketiga ahli tersebut adalah bahwa perubahan sosial merupakan fenomena yang kompleks dan fundamental dalam dinamika masyarakat. berbagai aspek perubahan sosial, termasuk faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya, seperti nilai, norma, institusi, globalisasi, teknologi, ekonomi, politik, dan budaya. Mereka juga menggambarkan peran penting konflik dan agen perubahan dalam proses perubahan sosial.

Melalui pendekatan yang berbeda, yaitu sosiologis, sejarah, dan antropologis, ketiga penulis memberikan pemahaman yang komprehensif bagaimana perubahan sosial terjadi, berkembang, dan dapat



dipahami dalam konteks masyarakat modern. Dengan bahasa yang jelas dan analisis yang mendalam, buku-buku ini memberikan wawasan yang berharga bagi pembaca yang tertarik dalam memahami dinamika perubahan sosial dan pembangunan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa konsep perubahan sosial merupakan suatu fenomena yang kompleks dan fundamental dalam dinamika masyarakat. Berbagai faktor internal dan eksternal, seperti nilai, norma, institusi, globalisasi, dan teknologi, memengaruhi perubahan sosial. Penekanan pada peran konflik, agen perubahan, dan teori-teori sosiologi membantu memahami kompleksitas perubahan sosial. Selain itu, melalui pendekatan sejarah dan prospektif, perubahan sosial dipandang sebagai proses terus-menerus yang dapat dihadapi sebagai tantangan dan peluang bagi pembangunan masa depan. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam tentang perubahan sosial tidak hanya penting untuk memahami struktur masyarakat, tetapi juga untuk membentuk arah dan karakter pembangunan masyarakat yang lebih baik di masa depan.

2.2 Konsep Industrialisasi

Perlu dipahami sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa bahwa teori perubahan sosial membahas bagaimana masyarakat mengalami transformasi dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Sementara konsep industrialisasi merupakan salah satu contoh penting dari perubahan antara teori perubahan sosial dengan konsep industrialisasi sangat karena teori perubahan sosial memberikan pemahaman tentang



proses-proses yang terlibat dalam pergeseran ini. Misalnya, bagaimana industrialisasi menciptakan spesialisasi kerja dan struktur sosial yang baru, di samping menyoroti ketidaksetaraan yang mungkin timbul akibat industrialisasi. Dalam konteks ini, teori perubahan sosial membantu untuk memahami dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi selama proses industrialisasi, termasuk konsekuensi-konsekuensinya terhadap masyarakat dan individu.

Industrialisasi adalah suatu proses sosial dan ekonomi yang melibatkan transformasi masyarakat dari yang sebelumnya didominasi oleh sektor pertanian dan kerajinan tangan menuju masyarakat yang lebih tergantung pada kegiatan industri dan manufaktur. Proses ini biasanya disertai dengan pertumbuhan pesat dalam sektor industri, penggunaan teknologi modern, perubahan dalam pola kerja, dan pergeseran dari ekonomi agraris ke ekonomi industri. Dalam proses industrialisasi, terjadi pertumbuhan pesat dalam sektor industri, di mana kegiatan produksi lebih didominasi oleh penggunaan teknologi modern, mesin, dan peralatan yang canggih. Industrialisasi juga melibatkan perubahan dalam pola kerja, di mana pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual secara bertahap digantikan oleh mesin dan otomatisasi. Selain itu, industrialisasi juga menghasilkan pergeseran dari ekonomi agraris, di mana kegiatan pertanian menjadi dominan, ke ekonomi industri di mana kegiatan



struktur dan produksi industri menjadi lebih penting. Ini mencerminkan karakteristik umum dari proses industrialisasi yang terjadi di banyak negara

di seluruh dunia sepanjang sejarah, dan berfungsi sebagai dasar untuk memahami dampak dan perubahan yang terjadi dalam konteks sosial dan ekonomi akibat industrialisasi.

Menurut Chang & Zach (2019), industrialisasi diartikan sebagai proses pengembangan sektor industri dalam suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Proses ini melibatkan penggunaan teknologi modern, peningkatan produksi, dan diversifikasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri. Dikatakan juga bahwa industrialisasi menyoroti pentingnya perencanaan industri yang baik dan dukungan pemerintah dalam mendorong proses industrialisasi.

Menurut Pramesti, dkk (2023). konsep industrialisasi merupakan perubahan sosial ekonomi yang dimana orang-orang ditransformasikan dari tahap pra industry yang pendapatan perkapitanya terakumulasi rendah ke tahap industrialisasi. sehingga industrialisasi bukan hanya transformasi ekonomi tetapi juga transformasi sosial. Sedangkan industri sendiri mempunyai arti yang menurut Sandi (2010:148) industri adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya.



di Menurut pendekatan ini, industrialisasi dianggap sebagai proses uhan ekonomi dalam mewujudkan perundistrian yang beriringan

dengan pengembangan teknologi. Jika pengembangan teknologi semakin canggih maka akan membantu perindustrian untuk terus maju dan meningkat. Begitu juga masyarakat, diharapkan bisa mengoptimalkan teknologi dengan baik agar dapat membuka usaha sendiri ataupun membuka peluang pekerjaan (Pramesti, dkk, 2023).

Dalam pengertian ekonomi Arsyad, L. (2004). Industrialisasi adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang mempunyai kaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Artinya industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai leading sector, maksudnya adalah dengan adanya perkembangan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya.

Adanya proses Industrialisasi dan Pembangunan industri ini sebenarnya merupakan satu jenis kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti singkathidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya lainnya. Hal ini berarti pula sebagai suatu usaha untuk meningkatkan produktivitas yang disertai usaha untuk meluaskan ruang lingkup kegiatan manusia. Dengan demikian dapat diusahakan secara “vertikal” maupun “horizontal” sehingga memperluas lapangan kerja produktif bagi penduduk yang semakin bertambah (Rampai,



ktor industri berperan sebagai “sektor pemimpin” (leading sector)

yang dimaksud dengan leading sector adalah dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Misalnya pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi industri. Sektor jasa pun berkembang dengan adanya industrialisasi tersebut, misalnya berdirinya lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga pemasaran, periklanan dan lain sebagainya. Kesemuanya itu akan menyebabkan meluasnya peluang kerjayang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan peningkatan permintaan (daya beli) masyarakat. Kenaikan pendapatan dan peningkatan permintaan (daya beli) tersebut menunjukkan perekonomian itu tumbuh, berkembang dan akan mencapai kestabilan (Rampai, 2021).

2.3 Konsep Transformasi

Konsep transformasi dalam teori perubahan sosial merujuk pada proses perubahan yang menyeluruh dan fundamental dalam struktur, nilai, dan pola perilaku dalam suatu masyarakat. Teori perubahan sosial menggambarkan transformasi sebagai hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi masyarakat. Faktor-faktor seperti teknologi, politik, ekonomi, dan budaya dapat memicu transformasi sosial yang signifikan. Konsep transformasi menyoroti dinamika yang mulai perubahan inkremental dan menyeluruh, sering kali silkan perubahan yang mendalam dan tidak terduga dalam



kehidupan sosial. Proses transformasi ini dapat melibatkan konflik, resolusi, dan reorganisasi struktural yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, transformasi juga sering kali menciptakan peluang baru, mengarah pada inovasi, pembaharuan, dan adaptasi yang membentuk wajah baru dari suatu masyarakat. Dengan demikian, konsep transformasi merupakan pemahaman yang penting dalam memahami bagaimana masyarakat berkembang dan berubah dari waktu ke waktu.

Menurut Santika (2018), konsep transformasi budaya merupakan sebuah proses yang melibatkan perubahan fundamental dalam cara individu atau masyarakat memandang, menghayati, dan berinteraksi dengan budaya mereka sendiri maupun budaya luar. Transformasi ini terjadi sebagai respons terhadap berbagai faktor eksternal dan internal, seperti globalisasi, urbanisasi, dan modernisasi. Dalam konteks globalisasi, budaya tidak lagi terbatas pada batas-batas geografis atau sosial, melainkan menjadi semakin terintegrasi dan terpengaruh oleh pertukaran informasi, teknologi, dan nilai-nilai dari berbagai belahan dunia. Urbanisasi juga menjadi salah satu faktor penting dalam transformasi budaya, dengan pergeseran populasi dari pedesaan ke perkotaan yang membawa perubahan dalam gaya hidup, nilai-nilai, dan pola interaksi sosial. Di sisi lain, modernisasi menghadirkan tantangan dan peluang baru dalam



tahankan identitas budaya sambil merespons perubahan zaman. Selain itu, transformasi budaya bukan sekadar perubahan kosmetik,

melainkan merupakan proses yang kompleks dan dinamis yang mengharuskan adaptasi, inovasi, dan pemeliharaan nilai-nilai budaya yang mendasar bagi keberlangsungan masyarakat.

Menurut Ardyanto (2019), konsep transformasi merujuk pada proses perubahan yang mendalam dan menyeluruh dalam suatu entitas, baik itu organisasi, sektor publik, maupun masyarakat secara luas. Transformasi ini melibatkan berbagai aspek seperti budaya, struktur, dan proses, serta seringkali didorong oleh kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Dalam konteks organisasi publik, transformasi dapat mencakup pembaharuan kebijakan, peningkatan efisiensi operasional, dan perubahan paradigma dalam pelayanan publik. Pentingnya transformasi organisasi publik terletak pada upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, memperkuat akuntabilitas, dan merespons tantangan-tantangan baru yang muncul dalam tatanan sosial dan politik. Denny Ardyanto menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang kokoh dari seluruh jajaran dalam menggerakkan proses transformasi tersebut, serta adanya dukungan yang memadai dari berbagai stakeholder terkait. Dengan demikian, transformasi organisasi publik bukanlah sekadar perubahan struktural semata, tetapi juga merupakan proses yang mengubah paradigma, budaya kerja, dan orientasi organisasi menuju peningkatan kinerja dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.



nurut Komariah (2017), konsep transformasi mengacu pada proses an yang melibatkan berbagai aspek dalam kehidupan sosial.

Transformasi tidak hanya mencakup perubahan struktural atau institusional, tetapi juga melibatkan perubahan dalam nilai-nilai, norma, dan pola perilaku dalam masyarakat. Transformasi dapat terjadi dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan. Aan Komariah menekankan pentingnya memahami dinamika sosial dalam konteks transformasi, termasuk faktor-faktor yang mendorong perubahan serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pandangannya, transformasi bukanlah proses yang statis, tetapi merupakan perjalanan yang terus-menerus, memerlukan adaptasi dan inovasi untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul di berbagai tingkatan sosial.

Transformasi sering kali muncul sebagai respons terhadap tuntutan baru, perkembangan teknologi, perubahan pasar, atau evolusi nilai masyarakat. Proses transformasi memerlukan pemikiran strategis, perencanaan yang matang, dan sering kali melibatkan penggunaan inovasi serta teknologi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks bisnis, transformasi dapat mencakup restrukturisasi organisasi, perubahan model bisnis, dan adaptasi terhadap tren pasar.

Menurut Dimiyati (2018), konsep transformasi merupakan suatu proses yang melibatkan perubahan mendalam dalam berbagai aspek organisasi. Transformasi tidak hanya sekedar perubahan permukaan, tetapi



libatkan perubahan dalam budaya, struktur, sistem, dan proses organisasi. Dimiyati menekankan pentingnya kesadaran akan

kebutuhan akan transformasi yang didorong oleh perubahan lingkungan eksternal dan internal. Dalam pandangan Dimiyati, transformasi tidak hanya tentang mengikuti tren atau teknologi baru, tetapi juga tentang menciptakan nilai tambah bagi organisasi dan semua pihak yang terlibat. Proses transformasi haruslah terencana dengan baik, melibatkan seluruh elemen organisasi, dan didukung oleh kepemimpinan yang kuat. Lebih dari sekedar sekumpulan perubahan, transformasi yang sukses menuntut adanya perubahan paradigma, sikap, dan pola pikir dalam menjawab tantangan yang dihadapi organisasi di era yang terus berkembang ini.

Transformasi bukanlah proses yang mudah dan seringkali menantang. Hal ini melibatkan perubahan sikap, budaya, dan cara bekerja. Selain itu, komunikasi yang efektif dan kepemimpinan yang kuat sangat penting untuk memandu entitas melalui perjalanan transformasi. Transformasi yang sukses dapat membantu entitas untuk tetap relevan, berdaya saing, dan responsif terhadap lingkungan yang terus berubah.

Dari aspek transformasi digital misalnya pengertian transformasi merangkum pergeseran fundamental dalam penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja bisnis dan organisasi. Ini melibatkan adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan, analitika data, dan komputasi awan untuk memodernisasi proses operasional dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Perusahaan-perusahaan

ka mulai memahami pentingnya transformasi ini dalam menjaga ng, di mana perubahan teknologi berkembang dengan cepat.



Transformasi sosial dan budaya mencakup perubahan signifikan dalam norma, nilai, dan pola perilaku masyarakat. Pada era digital dan globalisasi, komunikasi yang lebih cepat dan akses ke informasi telah mempercepat transformasi ini. Masyarakat mulai mengeksplorasi dan mengadopsi cara baru berinteraksi, bekerja sama, dan berbagi informasi. Pergeseran ini memainkan peran kunci dalam membentuk identitas kolektif, gerakan sosial, dan pandangan dunia yang berbeda.

Menurut Ani Setiowati (2022), konsep transformasi adalah proses yang melibatkan perubahan fundamental dalam suatu sistem atau entitas, baik itu dalam konteks organisasi, pendidikan, maupun sosial. Transformasi bukan hanya sekedar perubahan permukaan, tetapi mencakup perubahan yang mendalam dan berkelanjutan yang dapat memengaruhi struktur, budaya, dan perilaku suatu entitas. Dalam konteks pendidikan, transformasi melibatkan pengintegrasian teknologi digital dan metode pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi sistem pendidikan dalam menghadapi tuntutan zaman. Hal ini juga melibatkan perubahan paradigma dalam memandang peran guru, siswa, dan lingkungan belajar. Transformasi sosial mencakup perubahan dalam nilai-nilai, norma, dan tatanan sosial suatu masyarakat, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti globalisasi, teknologi, dan perubahan struktural ekonomi. Dengan demikian, konsep transformasi yang dikemukakan oleh



Setiowati menekankan pentingnya perubahan yang komprehensif dan menyeluruh dalam menghadapi dinamika zaman.

Sementara menurut Junaedi (2019) transformasi mengacu pada perubahan yang mendasar dan menyeluruh dalam suatu entitas, baik itu organisasi, bisnis, maupun masyarakat, sebagai respons terhadap dinamika lingkungan eksternal yang terus berubah. Transformasi tidak sekadar mencakup aspek teknologi digital, tetapi juga melibatkan restrukturisasi proses, budaya, dan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan relevansi entitas tersebut dalam konteks yang berubah dengan cepat. Fajar Junaedi menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi sebagai pendorong utama transformasi, dengan memanfaatkan inovasi dan digitalisasi untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Transformasi menurut pandangan Fajar Junaedi bukanlah sekadar perubahan kosmetik, melainkan suatu perubahan yang fundamental dan berkelanjutan yang membutuhkan komitmen, kepemimpinan yang kuat, serta kesiapan untuk menghadapi tantangan dan perubahan yang tidak terduga.

Transformasi bisnis dan inovasi mencakup perubahan mendalam dalam cara perusahaan beroperasi dan mengembangkan produk atau layanan baru. Konsep inovasi terus berkembang, dengan organisasi yang berusaha untuk mengintegrasikan pendekatan inovatif dalam setiap aspek bisnis mereka. Pergeseran ini dapat mencakup adopsi teknologi baru, restrukturisasi organisasi, atau pengembangan model bisnis yang lebih



terhadap perubahan pasar.

Menurut Kriyantono (2019), konsep transformasi merujuk pada proses

perubahan yang signifikan dan menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks ekonomi dan pembangunan Indonesia. Transformasi ekonomi bukan sekadar perubahan struktural, tetapi juga melibatkan adaptasi terhadap dinamika global dan lokal yang terus berubah. Dalam pandangan Kriyantono, transformasi ekonomi mengandung makna lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi; ia mencakup restrukturisasi sektor-sektor ekonomi, pemberdayaan sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan peningkatan daya saing nasional. Selain itu, transformasi ekonomi juga menekankan pada inklusivitas dan keadilan sosial, sehingga tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga membawa manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, konsep transformasi menurut Rachmat Kriyantono mencakup dimensi multidimensi yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia.

Transformasi pendidikan melibatkan restrukturisasi fundamental dalam sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan zaman. Inovasi dalam metode pengajaran, penekanan pada keterampilan kritis, dan integrasi teknologi dianggap kunci dalam membentuk pendidikan yang relevan dan adaptif. Pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer huan, tetapi juga pada pengembangan kreativitas, pemikiran kritis, keterampilan abad ke-21 yang diperlukan dalam dunia yang terus



berubah.

Sementara transformasi teknologi mencakup evolusi pesat dalam perkembangan dan adopsi teknologi baru. Dari revolusi internet hingga kecerdasan buatan dan Internet of Things (IoT), perkembangan ini mempengaruhi berbagai sektor, termasuk industri, kesehatan, dan transportasi. Integrasi teknologi ini tidak hanya mempercepat efisiensi operasional tetapi juga mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita, menciptakan ekosistem teknologi yang semakin terkoneksi dan cerdas. Menurut Satria (2020), bahwa transformasi sebagaimana diuraikan dalam karya-karyanya tentang transformasi digital dan Revolusi Industri 4.0, mengacu pada perubahan mendasar yang dipicu oleh kemajuan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi, tetapi juga menciptakan paradigma baru dalam berbagai sektor ekonomi, industri, dan sosial. Dalam konteks industri, transformasi digital memicu terciptanya "pabrik pintar" yang menggunakan teknologi seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan robotika untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengoptimalkan rantai pasok. Di bidang layanan, transformasi digital mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan, memperkenalkan solusi seperti e-commerce, layanan digital, dan pengalaman pengguna yang personal.



Di bidang sosial, transformasi ini memengaruhi interaksi antarpersona, pola komunikasi, dan pola pikir masyarakat secara keseluruhan, menciptakan

tantangan baru sekaligus peluang dalam membangun masyarakat yang lebih adaptif dan inklusif dalam era digital ini.

Menurut Feola (2015), penggunaan istilah 'transformasi' lebih sebagai metafora untuk menyampaikan ide perubahan mendasar, sistemik, atau radikal, misalnya dalam mata pencaharian keuangan tata kelola, pasar energi atau pertanian. Istilah 'transformasi' dalam kaitannya dengan berbagai isu yang terkait dengan perubahan masyarakat (seperti inovasi budaya atau teknis, adaptasi terhadap perubahan iklim), tetapi tidak mengandalkan atau mengembangkan dasar teoritis yang spesifik terkait transformasi tersebut.

Bentuk transformasi seperti dikemukakan oleh Kristjanson, dkk (2012), mengatakan bahwa ditemukan banyak rumah tangga sudah beradaptasi dengan perubahan situasi, dan perubahan mereka cenderung bersifat marginal daripada transformasional, dengan adopsi yang relatif rendah terhadap praktik-praktik pengelolaan tanah, air, dan lahan yang sudah ditingkatkan. Terdapat hubungan negatif yang kuat antara jumlah bulan kekurangan pangan dan inovasi, yaitu rumah tangga yang paling tidak aman pangan membuat sedikit perubahan dalam praktik pertanian mereka. Ini memiliki implikasi kebijakan dan investasi yang sangat berbeda tergantung pada asumsi-asumsi yang dibuat terkait arah kausalitasnya.

Huang, dkk (2012), membahas transformasi dari aspek pertanian yaitu



ias perubahan cepat penggunaan lahan di wilayah pesisir China
ingnya perhatian terhadap implikasi perubahan ini bagi masyarakat

setempat. Penilaian kerentanan masyarakat pesisir terhadap perubahan penggunaan lahan merupakan langkah penting untuk meningkatkan pemahaman dan pengambilan keputusan guna mengurangi kerentanan tersebut. Ia menyajikan kerangka analisis dan sistem indikator terkait untuk menilai dan membandingkan kerentanan masyarakat terhadap perubahan penggunaan lahan di wilayah pesisir, serta menyajikan studi kasus di China yang menerapkan kerangka tersebut.

Sementara konsep transformasi menurut Maulana (2020) mengacu pada upaya pemulihan dan konservasi lingkungan yang melibatkan perubahan fundamental dalam cara manusia berinteraksi dengan alam. Menurutnya, transformasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan hingga penerapan teknologi hijau dan gaya hidup yang ramah lingkungan. Rizki Maulana menekankan pentingnya kesadaran akan kerentanan lingkungan dan dampak dari aktivitas manusia terhadap ekosistem. Konsep transformasi yang diusungnya juga melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang holistik dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan lingkungan global.

Reganold, dkk (2011). Mengemukakan bentuk transformasi melalui aspek pertanian. Dia menyatakan bahwa agriculture di Amerika Serikat dan banyak negara lainnya sedang berada pada titik kritis. Investasi publik dan kebijakan akan membentuk praktik pengelolaan lanskap yang digunakan oleh petani dan peternak untuk menjaga keamanan



pangan dan ekosistem. Meskipun pertanian di AS telah menyediakan pasokan makanan dan produk lain yang terus berkembang, mereka juga menjadi kontributor utama terhadap gas rumah kaca global, kehilangan biodiversitas, degradasi sumber daya alam, dan masalah kesehatan masyarakat. Produktivitas pertanian dan daya ekonomi rentan terhadap kelangkaan sumber daya, perubahan iklim, dan volatilitas pasar. Kekhawatiran tentang keberlanjutan jangka panjang telah memicu minat pada bentuk-bentuk baru pertanian yang (i) meningkatkan dasar sumber daya alam dan lingkungan, (ii) membuat pertanian secara finansial berkelanjutan, dan (iii) berkontribusi pada kesejahteraan petani, pekerja pertanian, dan masyarakat pedesaan, sambil tetap (iv) menyediakan makanan, pakan, serat, dan bahan bakar yang berlimpah dan terjangkau.

Menurut Hasyim (2016), konsep transformasi politik mengacu pada upaya menuju demokrasi yang lebih berkualitas. Transformasi ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari meningkatkan partisipasi politik masyarakat, memperkuat akuntabilitas pemerintahan, hingga mendorong praktik good governance. Dalam konteks ini, transformasi politik tidak hanya terbatas pada perubahan struktur formal pemerintahan, tetapi juga mempertimbangkan aspek budaya dan sosial yang menjadi fondasi demokrasi yang sehat. Syafiq Hasyim menekankan pentingnya memperkuat institusi demokrasi, memberikan ruang yang lebih besar bagi



si publik, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan yang terhadap kekuasaan politik. Dengan demikian, transformasi politik

diarahkan untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara luas.

2.4 Konsep Modernisasi

Konsep modernisasi merupakan salah satu pendekatan dalam teori perubahan sosial yang menekankan proses perubahan menuju masyarakat yang lebih maju, terutama dalam hal ekonomi, politik, dan budaya. Dalam konteks ini, teori perubahan sosial dan konsep modernisasi saling terkait karena keduanya berfokus pada pemahaman tentang bagaimana masyarakat berkembang dari kondisi tradisional ke arah modern. Konsep modernisasi menekankan pentingnya industrialisasi, urbanisasi, dan sekularisasi dalam proses perubahan sosial, sementara teori perubahan sosial secara luas mempelajari berbagai faktor yang mempengaruhi transformasi sosial, termasuk faktor-faktor ekonomi, politik, teknologi, dan budaya. Dengan demikian, konsep modernisasi dapat dipandang sebagai salah satu kerangka kerja dalam teori perubahan sosial yang membantu menjelaskan bagaimana masyarakat bergerak menuju modernitas.

Menurut Arifin (2008) dalam bukunya yang berjudul "Modernisasi dan Identitas Indonesia: Sebuah Tinjauan Sosiologis", konsep modernisasi mengacu pada serangkaian transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi sebagai bagian dari upaya menuju kemajuan dan perubahan dalam masyarakat. Arifin menyajikan modernisasi sebagai fenomena yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, budaya, dan sosial. Dalam konteks Indonesia, modernisasi tidak



hanya mengubah struktur dan institusi masyarakat, tetapi juga memengaruhi identitas kolektif bangsa. Arifin menyoroti bagaimana modernisasi dapat memicu konflik antara nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai modern, serta menciptakan dinamika baru dalam hubungan sosial dan kekuasaan. Selain itu, Arifin juga menekankan pentingnya memahami modernisasi sebagai proses yang tidak homogen dan terus berubah, yang memerlukan penanganan yang bijaksana dalam konteks budaya dan nilai-nilai lokal.

Menurut Mas'ood (1980), konsep modernisasi adalah suatu proses transformasi yang meliputi perubahan secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu masyarakat. Dalam konsep ini, masyarakat dianggap berada dalam suatu tahap evolusi yang ditandai dengan peningkatan keberlanjutan, efisiensi, dan rasionalitas dalam struktur dan fungsi sosial mereka. Modernisasi membawa perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang lebih maju secara teknologi, institusional, dan budaya. Proses ini seringkali disertai dengan urbanisasi, industrialisasi, sekularisasi, dan kemajuan pendidikan. Namun, Mas'ood, M juga mengakui bahwa modernisasi tidak selalu membawa dampak positif, karena dapat menimbulkan ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan kehilangan nilai-nilai tradisional yang penting bagi keberlangsungan budaya suatu masyarakat. Oleh karena itu, dalam



ntasinya, modernisasi perlu diiringi dengan kebijakan yang a agar dampak negatifnya dapat diminimalkan dan manfaatnya

dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Menurut Djohar (1994), modernisasi secara umum mencakup upaya untuk mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip dan praktik-praktik modern dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di Indonesia, modernisasi sering kali terkait dengan upaya pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan tingkat pembangunan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan teknologi guna mencapai standar yang dianggap modern. Juga mengeksplorasi dampak modernisasi terhadap ketimpangan sosial, termasuk kemiskinan, dan tantangan yang dihadapi dalam proses modernisasi tersebut.

Menurut Commons (1994), konsep modernisasi mengacu pada pembangunan dalam perspektif sejarah yang melibatkan perubahan signifikan dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik suatu masyarakat. Dalam pandangannya, modernisasi tidak hanya mencakup aspek teknologi atau industrialisasi semata, tetapi juga melibatkan transformasi lebih luas yang mempengaruhi cara hidup, nilai-nilai, dan institusi-institusi sosial. Commons menekankan bahwa modernisasi tidak bersifat homogen atau linear, tetapi melibatkan proses yang kompleks, termasuk konflik dan ketegangan antara berbagai kepentingan sosial dan politik. Baginya, modernisasi adalah tentang perubahan yang berkelanjutan dan beragam, yang dapat menghasilkan dampak yang signifikan terhadap masyarakat



keseluruhan.

Menurut Todaro (1994), konsep modernisasi merujuk pada

serangkaian transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam masyarakat sebagai respons terhadap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dalam pandangannya, modernisasi melibatkan berbagai aspek, termasuk industrialisasi, urbanisasi, perubahan budaya, dan peningkatan standar hidup. Todaro mengemukakan bahwa modernisasi sering dianggap sebagai proses yang diarahkan menuju perkembangan ekonomi yang lebih maju dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, ia juga menyoroti bahwa modernisasi tidak selalu merata dalam dampaknya, dan sering kali menimbulkan ketimpangan antara berbagai kelompok masyarakat serta menimbulkan tantangan baru seperti perubahan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, Todaro memandang modernisasi sebagai sebuah fenomena kompleks yang memerlukan analisis yang cermat terhadap berbagai dinamika yang terlibat dalam proses tersebut.

Menurut Meyer (1991), konsep modernisasi mencakup lebih dari sekadar transformasi sosial dan ekonomi. Dalam pandangannya, modernisasi juga melibatkan interaksi kompleks antara institusi-institusi sosial, budaya, dan politik dalam suatu masyarakat. Meyer menyoroti bahwa modernisasi tidaklah homogen; setiap negara atau wilayah memiliki jalannya sendiri dalam mengalami modernisasi, tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan kelembagaan lokal mereka. Konsep ini mencakup



di aspek, mulai dari industrialisasi dan urbanisasi hingga perubahan budaya dan norma-norma sosial. Meyer juga menekankan pentingnya

penelitian tentang modernisasi di negara-negara dunia ketiga, di mana proses ini sering kali berlangsung dalam kerangka globalisasi yang kompleks. Dalam kajiannya, Meyer mengakui bahwa modernisasi dapat membawa dampak positif seperti pertumbuhan ekonomi dan peningkatan standar hidup, tetapi juga menyoroti tantangan seperti ketimpangan sosial dan konflik budaya yang sering terjadi dalam proses ini. Dengan demikian, pandangan Meyer tentang konsep modernisasi menekankan pentingnya memahami konteks lokal dan dinamika global dalam menganalisis perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat modern.

Menurut Giddens (1993), konsep modernisasi adalah proses kompleks yang melibatkan perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk struktur sosial, pola interaksi, dan sistem nilai. Giddens menekankan bahwa modernisasi tidak hanya terjadi dalam ranah ekonomi dan teknologi, tetapi juga membawa perubahan dalam cara manusia memahami diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Bagi Giddens, modernisasi tidak hanya berarti mengadopsi teknologi baru atau mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengubah pola pikir dan tatanan sosial yang mendalam. Konsep ini melibatkan pergeseran dari masyarakat tradisional yang didasarkan pada nilai-nilai lama dan struktur hierarkis, menuju masyarakat modern yang lebih terbuka, egaliter, dan terhubung secara global. Giddens juga menyoroti bahwa modernisasi

ali diiringi oleh berbagai tantangan dan konflik, baik dalam hal terhadap perubahan maupun dalam upaya mengatasi



ketidaksetaraan yang muncul akibat modernisasi itu sendiri. Dengan demikian, bagi Giddens, konsep modernisasi melibatkan transformasi sosial yang kompleks dan multi-dimensi, yang memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat manusia.

Menurut Dick, H., & Houben, V. J. H. (2010), modernisasi adalah suatu proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan transformasi secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk budaya, ekonomi, dan politik, yang terjadi sebagai respons terhadap perubahan zaman. Mereka menekankan bahwa modernisasi tidak hanya terbatas pada pengenalan teknologi dan institusi-institusi Barat, tetapi juga melibatkan adaptasi dan reinterpretasi lokal terhadap nilai-nilai dan praktik-praktik baru yang dibawa oleh modernitas. Modernisasi dipandang sebagai fenomena global yang tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat yang mengalami proses transformasi tersebut. Dalam konteks Asia Tenggara, modernisasi dipelajari sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sejarah, dan politik yang unik bagi wilayah tersebut, yang mempengaruhi cara masyarakat setempat beradaptasi dan merespons perubahan tersebut.

Walt Whitman Rostow dalam bukunya yang terkenal, "The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto" (1960), mengusulkan

lima tahap pertumbuhan ekonomi yang menjadi landasan bagi modernisasi. Berikut adalah gambaran singkat tentang setiap



tahap:

1. Tahap Tradisional atau Tahap Masyarakat Pra-kondisi: Pada tahap ini, ekonomi didominasi oleh sektor pertanian dan produksi bersifat subsisten (untuk kebutuhan sendiri). Industri dan perdagangan sangat terbatas, serta sedikit inovasi teknologi. Populasi cenderung stabil karena tingkat kelahiran dan kematian seimbang.
2. Tahap Pra-Kondisi Perdagangan (Take-off): Tahap ini ditandai dengan munculnya sektor industri yang berkembang pesat, yang didorong oleh adopsi teknologi baru dan pertumbuhan perdagangan yang signifikan. Investasi dalam infrastruktur dan pendidikan meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang cepat memicu perubahan sosial dan transformasi struktural dalam masyarakat.
3. Tahap Perkembangan yang Bertahan (Drive to Maturity): Pada tahap ini, ekonomi terus berkembang dengan keberlanjutan pertumbuhan yang tinggi. Sektor industri semakin berkembang, sementara sektor agraris mengalami penurunan relatif dalam kontribusinya terhadap PDB. Peran pemerintah menjadi lebih penting dalam mengatur dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.
4. Tahap Masyarakat yang Matang (High Mass Consumption): Tahap ini ditandai dengan munculnya masyarakat konsumsi yang tinggi, di mana tingkat pendapatan per kapita mencapai puncaknya. Sektor sa berkembang pesat, dan inovasi produk dan teknologi terus meningkat. Masyarakat menjadi lebih urban, dengan tingkat



urbanisasi yang tinggi.

5. Tahap Konsumsi Masyarakat yang Matang (Age of High Mass Consumption): Pada tahap terakhir ini, masyarakat telah mencapai tingkat kekayaan dan konsumsi yang tinggi. Ekonomi didominasi oleh sektor jasa, dan inovasi terus memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Fokus utama beralih dari pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan.

Hogan (2018) dalam bukunya "The Rise and Fall of Modernization Theory" menyajikan analisis yang mendalam tentang konsep modernisasi menurut Walt Whitman Rostow. Menurut Hogan, Rostow memandang modernisasi sebagai suatu proses evolusi yang terdiri dari lima tahap pertumbuhan ekonomi, di mana masyarakat bergerak dari tahap tradisional menuju tahap kesejahteraan ekonomi yang tinggi. Rostow percaya bahwa modernisasi tidak hanya melibatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perubahan sosial, politik, dan budaya yang menyertainya. Hogan menyoroti bahwa konsep Rostow telah mempengaruhi pandangan dan kebijakan pembangunan di banyak negara, terutama Amerika Serikat, dan menjadi bagian integral dari narasi modernisasi pada masa itu. Namun, Hogan juga mengkritik konsep Rostow karena kesederhanaannya yang kurang memperhitungkan keragaman konteks sosial, politik, dan budaya di

i negara. Kritik ini menyoroti bahwa konsep Rostow cenderung aikan realitas kompleks pembangunan di dunia nyata dan dapat



menyebabkan pemahaman yang terlalu sempit tentang proses modernisasi.

Dalam bukunya yang berjudul "Modernization as Ideology: American Social Science and Nation Building in the Kennedy Era" (2017), Latham membahas konsep modernisasi Rostow sebagai bagian dari ideologi pembangunan nasional Amerika Serikat selama era Kennedy. Menurut Latham, Rostow memandang modernisasi sebagai suatu proses evolusi yang mengarah pada kemajuan ekonomi, politik, dan sosial suatu negara. Konsep ini terutama diterapkan dalam konteks upaya Amerika Serikat untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan politik di negara-negara berkembang, sebagai bagian dari agenda luar negeri mereka. Rostow percaya bahwa melalui bantuan teknis, investasi ekonomi, dan promosi nilai-nilai kapitalisme, negara-negara berkembang dapat mencapai tahap-tahap pertumbuhan yang dijelaskan dalam teorinya. Namun, Latham juga menyoroti bahwa konsep modernisasi Rostow telah menjadi subjek kritik yang cukup banyak karena sifatnya yang terlalu universal dan seringkali tidak mempertimbangkan konteks historis, budaya, dan politik yang kompleks di negara-negara berkembang.

Menurut March (2017), konsep modernisasi menurut Rostow masih memiliki relevansi dalam pemahaman tentang perkembangan ekonomi dan sosial di negara-negara berkembang. Rostow melihat modernisasi sebagai



proses evolusi yang melibatkan tahap-tahap pertumbuhan ekonomi jenjang, dari masyarakat tradisional hingga masyarakat yang maju

secara ekonomi. Meskipun konsep lima tahap pertumbuhan Rostow telah dikritik karena kesederhanaannya yang kurang memperhatikan konteks historis dan sosial yang kompleks, namun pandangan Rostow tetap memberikan landasan penting dalam memahami perubahan ekonomi dan sosial. Meskipun demikian, para peneliti telah mengakui bahwa konsep Rostow tidak dapat diaplikasikan secara langsung ke semua konteks pembangunan, dan pendekatan yang lebih kontekstual dan holistik diperlukan untuk memahami realitas pembangunan yang beragam di seluruh dunia.

2.5 Kepemimpinan dan Kepemimpinan Adat

Kepemimpinan (leadership) berkenaan dengan seseorang memengaruhi perilaku orang lain untuk suatu tujuan. Dengan kekuasaan, pemimpin dapat memengaruhi perilaku para bawahannya. Kekuasaan dapat dibagi menjadi lima, yaitu: (1) kekuasaan keahlian (expert power); (2) kekuasaan legitimasi (legitimate power); (3) kekuasaan referensi (referent power); (4) kekuasaan penghargaan (reward power); dan (5) kekuasaan paksaan (coercive power). Disamping berhubungan dengan kekuasaan, kepemimpinan juga erat kaitannya dengan karakter (Yudiaatmaja, 2013).

Menurut Kadarusman (2012) kepemimpinan (Leadership) dibagi tiga, yaitu: (1) *Self Leadership*; (2) *Team Leadership*; dan (3) *Organizational Leadership*. *Self Leadership* yang dimaksud adalah memimpin diri sendiri dengan sampai gagal menjalani hidup. *Team Leadership* diartikan memimpin orang lain. Pemimpinnya dikenal dengan istilah team



leader (pemimpin kelompok) yang memahami apa yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya, menyelami kondisi bawahannya, kesediaannya untuk meleburkan diri dengan tuntutan dan konsekuensi dari tanggung jawab yang dipikulnya, serta memiliki komitmen untuk membawa setiap bawahannya mengeksplorasi kapasitas dirinya hingga menghasilkan prestasi tertinggi. Sedangkan *organizational leadership* dilihat dalam konteks suatu organisasi yang dipimpin oleh organizational leader (pemimpin organisasi) yang mampu memahami nafas bisnis perusahaan yang dipimpinnya, membangun visi dan misi pengembangan bisnisnya, kesediaan untuk melebur dengan tuntutan dan konsekuensi tanggung jawab sosial, serta komitmen yang tinggi untuk menjadikan perusahaan yang dipimpinnya sebagai pembawa berkah bagi komunitas baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Dari sekian banyaknya definisi tentang kepemimpinan, ada yang menyebutkan kepemimpinan merupakan suatu kegiatan untuk memengaruhi orang lain. Kepemimpinan merupakan suatu proses untuk memengaruhi aktivitas kelompok. Kepemimpinan merupakan kemampuan memperoleh kesepakatan pada tujuan bersama. Kepemimpinan adalah suatu upaya untuk mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling memengaruhi antara pemimpin dan pengikutnya. Walaupun cukup sulit menggeneralisir, pada



ra kepemimpinan (leadership) berkenaan dengan seseorang yang berusaha memengaruhi perilaku orang lain untuk suatu tujuan. Tapi bukan berarti

bahwa setiap orang yang memengaruhi orang lain untuk suatu tujuan disebut pemimpin (Yudiaatmaja, 2013).

Menurut Fink dan Mladkova (dalam Febrianty dkk, 2020), kepemimpinan merupakan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang tidak mereka inginkan dan akhirnya menyukainya atau sederhananya, kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi yang bertujuan untuk pencapaian tujuan. Kepemimpinan memiliki seperangkat nilai dan meyakini, kepemimpinan juga memiliki pandangan ke depan, pengetahuan dan intuisi, terutama tentang orang-orang. Pemimpin tidak bisa berharap orang lain percaya pada mereka jika mereka tidak percaya pada diri mereka sendiri. Para pemimpin harus menciptakan suasana di mana orang percaya pada strategi, percaya pada keputusan manajemen, dan percaya pada pekerjaan mereka. Begitu orang percaya pada keputusan manajemen, ada kegembiraan dalam organisasi. Suasana seperti itu membuat organisasi makmur. Pemimpin yang sukses harus menciptakan lingkungan yang demikian baik di dalam maupun di luar organisasi.

McCleskey (dalam Silva, 2016), menyatakan bahwa upaya untuk menemukan definisi tunggal kepemimpinan mungkin sia-sia. Hal ini dikarenakan definisi yang benar-benar tepat tentang kepemimpinan bergantung pada minat peneliti dan jenis masalah atau situasi yang sedang

dengan kata lain, apa yang dianggap sebagai kepemimpinan yang dapat bervariasi tergantung pada fokus penelitian dan situasi yang



sedang diamati. Bagi Carlyle, pemimpin adalah individu yang luar biasa atau pahlawan yang mampu menggunakan karismanya, kecerdasan, kebijaksanaan, dan keterampilan politik untuk memiliki kekuasaan dan pengaruh atas orang lain.

Menurut Stogdill (dalam Silva, 2016) kepemimpinan diartikan sebagai "proses (tindakan) mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisir dalam upayanya mencapai penetapan dan pencapaian tujuan". Ini mungkin merupakan upaya pertama untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan bukanlah sekadar sifat individual semata, melainkan suatu proses pengaruh terhadap orang lain. Stogdill juga menjelaskan tujuan dari proses tersebut: "penetapan dan pencapaian tujuan".

Kemudian Tannenbaum, Weschler, dan Massarik melanjutkan pendekatan yang sama dengan Stogdill dan mendefinisikan kepemimpinan sebagai "pengaruh interpersonal yang dilakukan dalam suatu situasi, dan diarahkan, melalui proses komunikasi, menuju pencapaian tujuan tertentu atau tujuan-tujuan". Zaleznik juga menekankan aspek pengaruh dalam kepemimpinan: "Kepemimpinan memerlukan penggunaan kekuatan untuk memengaruhi pikiran dan tindakan orang lain" (Silva, 2016)

Sementara menurut Kotter (dalam Silva, 2016), kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai "proses memindahkan suatu kelompok (atau kelompok-kelompok) ke arah tertentu melalui cara yang sebagian besar

non-koersif". Menurut definisi ini, penggunaan cara koersif tidak dianggap sebagai kepemimpinan, karena seharusnya terdapat



keikutsertaan sukarela dari para pengikut. Namun, tidak semua sarjana sepakat dengan perbedaan ini; sebagai contoh, Kellerman bersikeras bahwa penggunaan kekuatan juga dapat dianggap sebagai kepemimpinan (Silva, 2016).

Pentingnya pendekatan berbasis inklusi dalam kepemimpinan juga semakin diakui di Indonesia. Pemimpin inklusif mengakui keberagaman timnya dan memastikan bahwa setiap individu di dalamnya merasa dihargai dan didengarkan (Syafaruddin, 2020). Pendekatan ini menciptakan lingkungan di mana kolaborasi dan inovasi dapat berkembang.

Melalui integrasi konsep-konsep ini, kepemimpinan di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan dinamika transformasi yang ada, menciptakan organisasi yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Referensi yang disebutkan dapat menjadi panduan untuk memahami lebih dalam tentang dinamika transformasi kepemimpinan, baik dalam konteks global maupun lokal.

Selanjutnya berkenaan dengan konsep kepemimpinan adat terdapat beberapa pemikiran dari beberapa ahli. Magnis-Suseno (1999) dalam bukunya "Kepemimpinan Adat: Sebuah Perspektif Sosial-Budaya" membahas konsep kepemimpinan adat sebagai sebuah fenomena yang melibatkan dinamika sosial dan budaya dalam masyarakat tradisional. Menurutnya, kepemimpinan adat merupakan hasil dari warisan budaya



wariskan dari generasi ke generasi. Kepemimpinan adat tidak hanya berkaitan dengan jabatan atau posisi tertentu, tetapi lebih merupakan

ekspresi dari kualitas moral dan kebijaksanaan yang diakui oleh masyarakat sebagai pemimpin mereka. Magnis-Suseno menekankan bahwa kepemimpinan adat sering kali tidak terpaku pada struktur formal atau hierarki yang tetap, melainkan lebih bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Dalam konteks ini, seorang pemimpin adat diharapkan untuk memahami dan merespons perubahan-perubahan dalam masyarakat serta menjaga keseimbangan antara tradisi dan perkembangan zaman. Kesimpulannya, konsep kepemimpinan adat menurut Magnis-Suseno melibatkan aspek-aspek budaya, moral, dan dinamika sosial yang membentuk karakter dan peran seorang pemimpin dalam masyarakat tradisional.

Kepemimpinan adat menurut Djalal (1985) melibatkan pemahaman mendalam tentang tradisi dan nilai-nilai budaya yang mendasari sistem kepemimpinan dalam masyarakat adat. Djalal menyoroti peran penting kepemimpinan tradisional dalam membentuk dan memelihara harmoni sosial serta keseimbangan ekosistem sosial masyarakat adat. Menurutnya, pemimpin adat tidak hanya bertugas dalam ranah politik atau administratif, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kearifan lokal dan penjaga keutuhan sosial budaya masyarakat. Djalal menekankan bahwa kepemimpinan adat bukan sekadar jabatan atau kekuasaan, melainkan tanggung jawab yang didasarkan pada kearifan lokal, keadilan, dan kebersamaan. Selain itu,



ga menyoroti adaptasi kepemimpinan adat terhadap perubahan dan tantangan modernisasi, yang mengharuskan pemimpin adat

untuk tetap memegang teguh nilai-nilai tradisional sambil merespons dinamika sosial yang terus berubah.

Kepemimpinan adat menurut Faber (2013) menggambarkan peran dan fungsi yang dimiliki oleh sistem kepemimpinan tradisional di Indonesia. Dalam pandangannya, kepemimpinan adat tidak hanya berperan sebagai otoritas politik, tetapi juga sebagai penjaga dan pemelihara nilai-nilai budaya serta kearifan lokal. Faber menekankan bahwa kepemimpinan adat adalah manifestasi dari struktur sosial dan budaya yang telah tertanam dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Kepemimpinan adat cenderung bersifat kolektif, di mana pemimpinnya tidak hanya memegang kekuasaan secara individu, tetapi juga bertanggung jawab kepada komunitasnya. Selain itu, kepemimpinan adat juga memiliki keterkaitan yang erat dengan lingkungan alam dan spiritualitas, yang tercermin dalam praktik-praktik adat dan ritual keagamaan yang dijalankan oleh pemimpin adat. Melalui konsep ini, Faber menegaskan pentingnya memahami dan menghormati sistem kepemimpinan adat dalam konteks pembangunan dan perubahan sosial di Indonesia.

Menurut Silas (1986) dalam bukunya "Pergolakan Struktural Indonesia: Kepemimpinan Adat dan Pembangunan", konsep kepemimpinan adat merupakan suatu sistem yang mencakup berbagai nilai, norma, dan tradisi yang telah berkembang dalam masyarakat adat

perabad-abad. Silas menekankan bahwa kepemimpinan adat tidak bersifat hierarkis, tetapi juga bersifat kolektif, di mana keputusan



diambil melalui musyawarah dan konsensus. Kepemimpinan adat juga sering kali terkait erat dengan kedudukan dan peran sosial dalam masyarakat adat, di mana pemimpin adat sering kali merupakan tokoh yang dihormati dan diakui oleh seluruh komunitas. Dalam konteks pembangunan, Silas menyoroti pentingnya mengakui dan memahami peran serta nilai-nilai kepemimpinan adat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, serta perlunya sinergi antara sistem kepemimpinan adat dengan sistem pemerintahan modern untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat adat dan masyarakat luas.

Menurut Hadi (2003), kepemimpinan adat, seperti yang dijelaskan dalam bukunya "Kepemimpinan Adat dalam Masyarakat Bugis", menekankan pada sistem nilai dan norma-norma yang telah tertanam dalam masyarakat adat Bugis di Sulawesi Selatan. Hadi menggambarkan bahwa kepemimpinan adat dalam masyarakat Bugis tidak hanya berfokus pada otoritas formal atau struktural semata, tetapi juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, dan kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Konsep kepemimpinan adat Bugis juga menekankan pentingnya peran pemimpin untuk menjadi mediator, penjaga keharmonisan sosial, dan pemimpin yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, kepemimpinan adat dalam masyarakat Bugis juga mengakar pada nilai-nilai



gaan dan kegotongroyongan, di mana pemimpin diharapkan untuk k sebagai figur yang mengayomi dan memastikan kesejahteraan

anggota masyarakat. Dengan demikian, konsep kepemimpinan adat menurut Amirul Hadi menggambarkan sebuah sistem kepemimpinan yang derpenting dalam memelihara harmoni sosial serta pembangunan masyarakat secara holistik.

2.6 Kepemimpinan Tradisional dan Modern

Kepemimpinan tradisional sering kali didasarkan pada otoritas dan hierarki yang kuat, di mana pemimpin dianggap sebagai figur yang memiliki kebijaksanaan dan kekuasaan yang tidak dapat disangsikan. Kepemimpinan ini sering ditemui dalam struktur masyarakat yang lebih kaku dan konservatif, di mana nilai-nilai budaya dan tradisi sangat dihormati. Pemimpin tradisional cenderung mempertahankan status quo dan memandang perubahan sebagai ancaman. Mereka mungkin kurang terbuka terhadap masukan dari bawahan dan lebih memilih untuk membuat keputusan sendiri.

Di sisi lain, kepemimpinan modern cenderung lebih inklusif dan kolaboratif. Pemimpin modern membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim mereka, menghargai diversitas, dan mendorong partisipasi aktif. Mereka lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi, melihatnya sebagai peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kepemimpinan modern menekankan pada pengembangan keterampilan interpersonal, kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai, dan pemecahan masalah bersama-sama. Pemimpin modern juga cenderung lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika lingkungan yang berubah dengan cepat.



Dengan demikian, mereka lebih mampu untuk menyesuaikan diri dan membawa organisasi mereka menuju kesuksesan jangka panjang.

Menurut Haryatmoko (1999), bahwa kepemimpinan tradisional sering kali mencerminkan otoritas yang terpusat pada seorang pemimpin yang dianggap memiliki kebijaksanaan dan kekuasaan yang tidak terbantahkan. Model ini, sering kali berakar dalam nilai-nilai budaya lokal dan sistem kepercayaan yang turun-temurun. Di sisi lain, kepemimpinan modern cenderung lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Dalam konteks demokrasi Pancasila, Haryatmoko menyajikan argumen bahwa transformasi menuju kepemimpinan modern yang demokratis merupakan suatu proses penting dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Pancasila. Ia menekankan pentingnya keselarasan antara nilai-nilai tradisional yang masih relevan dengan tuntutan-tuntutan modern akan partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam kepemimpinan. Dengan demikian, Haryatmoko mendorong untuk menggabungkan aspek-aspek yang baik dari kedua model kepemimpinan tersebut guna membangun sebuah sistem kepemimpinan yang inklusif dan berdaya guna bagi kemajuan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Kepemimpinan: Teori dan Praktek di Indonesia", Abdullah (2010) menguraikan perbedaan antara kepemimpinan tradisional dan modern dengan cermat. Menurutnya,



Kepercayaan pemimpin tradisional cenderung mengutamakan otoritas dan hierarki yang ketat, di mana pemimpin dianggap sebagai figur yang memiliki

kebijaksanaan dan kekuasaan yang tidak dapat dipertanyakan. Sementara itu, dalam kepemimpinan modern, terdapat penekanan pada aspek partisipatif dan kolaboratif, di mana pemimpin lebih mengedepankan dialog, keterbukaan, dan partisipasi dari bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Abdullah juga menyoroti pentingnya adaptasi kepemimpinan terhadap konteks budaya dan lingkungan yang berubah, dengan menggabungkan elemen-elemen tradisional dan modern sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Dengan pendekatan ini, pemimpin diharapkan mampu menciptakan keseimbangan yang harmonis antara nilai-nilai tradisional yang berakar kuat dan prinsip-prinsip modern yang mengakomodasi kompleksitas era kontemporer.

Dalam bukunya yang berjudul "Kepemimpinan Politik di Indonesia: Antara Tradisi dan Modernitas", Tilarso (2013) menguraikan perbandingan antara kepemimpinan tradisional dan modern dalam konteks politik Indonesia. Menurutnya, kepemimpinan tradisional cenderung bersifat otoriter dan berakar dalam struktur sosial yang sudah ada sejak lama, seperti kekuasaan yang diwariskan secara turun-temurun atau berbasis pada hubungan personal yang kuat. Di sisi lain, kepemimpinan modern cenderung lebih terbuka, responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi serta aturan hukum yang jelas.

Tilarso juga menyoroti bagaimana proses modernisasi dan globalisasi telah m

garuhi dinamika politik di Indonesia, mendorong munculnya akan kepemimpinan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan



menggabungkan perspektif tradisional dan modern, Tilarso membahas tantangan dan peluang bagi pengembangan model kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai Indonesia saat ini.

Dalam bukunya yang berjudul "Transformasi Kepemimpinan: Dari Tradisional ke Modern," Kasali (2009), membahas perubahan paradigma kepemimpinan dari yang tradisional menuju yang modern. Kasali menyoroti bahwa kepemimpinan tradisional seringkali didasarkan pada hierarki yang kuat, otoritas tunggal, dan penekanan pada perintah dan kontrol. Di sisi lain, kepemimpinan modern cenderung lebih terbuka, kolaboratif, dan memperhatikan partisipasi anggota tim. Kasali menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan zaman dan dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Ia juga menguraikan bagaimana transformasi teknologi dan globalisasi telah memengaruhi tuntutan yang diberikan kepada para pemimpin, yang kini diharapkan memiliki keterampilan komunikasi yang kuat, kemampuan untuk mengelola perubahan, serta pemahaman yang mendalam tentang keragaman budaya. Dengan demikian, Kasali mendorong para pemimpin untuk mempelajari dan mengadopsi model kepemimpinan yang sesuai dengan era kontemporer, di mana adaptabilitas, keterbukaan, dan pemberdayaan menjadi kunci keberhasilan dalam memimpin organisasi.

Berdasarkan analisis yang disajikan oleh para penulis tersebut,



perbedaan yang signifikan antara kepemimpinan tradisional dan Kepemimpinan tradisional cenderung menekankan hierarki yang

kuat, otoritas yang terpusat pada seorang pemimpin yang dianggap memiliki kebijaksanaan dan kekuasaan yang tidak terbantahkan, serta penekanan pada perintah dan kontrol. Sebaliknya, kepemimpinan modern lebih terbuka, responsif terhadap aspirasi rakyat, kolaboratif, dan memperhatikan partisipasi anggota tim dalam pengambilan keputusan. Adapun kunci keberhasilan dalam kepemimpinan modern adalah adaptabilitas, keterbukaan, kemampuan mengelola perubahan, serta pemahaman yang mendalam tentang keragaman budaya dan dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Namun demikian, para penulis juga menyoroti pentingnya menggabungkan elemen-elemen baik dari kedua model kepemimpinan tersebut guna membangun sebuah sistem kepemimpinan yang inklusif, berdaya guna, dan sesuai dengan nilai-nilai serta kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Dengan demikian, transformasi menuju kepemimpinan modern yang demokratis merupakan suatu proses penting dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Pancasila serta menjawab tuntutan zaman yang semakin kompleks dan dinamis.

2.7 Kelembagaan dan Kelembagaan Lokal

Kelembagaan menurut North (1990) mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana aturan, norma, dan struktur organisasi yang ada dalam masyarakat memengaruhi perilaku ekonomi dan perkembangan ekonomi. Menurut North, kelembagaan merupakan pola-pola interaksi yang terbentuk dari peraturan formal dan informal yang membatasi serta



membimbing perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Pemahaman tentang kelembagaan melibatkan pengenalan terhadap peran institusi dalam menciptakan insentif bagi aksi individu, mengkoordinasikan aktivitas ekonomi, serta mempengaruhi proses pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. North menekankan pentingnya analisis historis untuk memahami bagaimana kelembagaan terbentuk dan berkembang dari waktu ke waktu, serta bagaimana perubahan kelembagaan tersebut memengaruhi evolusi ekonomi suatu masyarakat. Secara keseluruhan, konsep kelembagaan menurut Douglas C. North menyoroti pentingnya peran institusi dalam membentuk struktur ekonomi dan sosial suatu negara serta memberikan landasan bagi analisis mengenai pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pembangunan masyarakat.

Menurut Dye (2002), kelembagaan merupakan kumpulan norma, aturan, dan prosedur formal serta informal yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam suatu sistem sosial. Dye menekankan bahwa kelembagaan tidak hanya mencakup struktur pemerintahan formal, tetapi juga meliputi organisasi politik, ekonomi, dan sosial yang lebih luas. Konsep kelembagaan menurut Dye mencerminkan pola-pola yang terbentuk dari interaksi manusia dan institusi dalam masyarakat. Selain itu, Dye juga menyoroti peran penting kelembagaan dalam membentuk proses pembuatan keputusan politik dan dalam mempengaruhi distribusi



an di dalam suatu sistem politik. Baginya, kelembagaan
an fondasi dari struktur sosial dan politik, yang memengaruhi

dinamika dan stabilitas sistem politik sebuah negara. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kelembagaan menjadi kunci dalam menganalisis dan memahami politik suatu negara.

Menurut Chang (2005), kelembagaan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Chang menganggap bahwa kelembagaan, baik formal maupun informal, merupakan fondasi yang membentuk struktur ekonomi suatu negara. Dalam pandangannya, kelembagaan tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga pemerintah atau peraturan hukum, tetapi juga mencakup norma, nilai, dan praktik-praktik yang menjadi bagian dari masyarakat. Chang menekankan bahwa kelembagaan memiliki kemampuan untuk membentuk insentif dan aturan main dalam aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, distribusi kekayaan, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, Chang menyoroti bahwa kelembagaan juga berperan dalam menciptakan dan memelihara kesetaraan, memperkuat kapasitas negara untuk memperbaiki ketidakadilan ekonomi, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang rentan. Dengan demikian, menurut Chang, pemahaman yang mendalam tentang peran kelembagaan sangatlah penting dalam merancang kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Menurut Helpman (1998), kelembagaan merupakan struktur atau aturan formal dan informal yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam suatu masyarakat atau organisasi. Dalam konteks



ekonomi, kelembagaan memainkan peran penting dalam membentuk insentif, mengatur interaksi antar agen ekonomi, serta mempengaruhi efisiensi dan distribusi sumber daya. Kelembagaan mencakup berbagai hal, mulai dari peraturan hukum, norma sosial, sampai pada kebiasaan dan praktik yang telah tertanam dalam suatu lingkungan. Dengan adanya kelembagaan yang efektif, individu dan organisasi dapat bekerja secara lebih efisien dan mengurangi ketidakpastian dalam interaksi ekonomi. Selain itu, kelembagaan juga memainkan peran dalam pembangunan ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, inovasi, dan pertumbuhan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kelembagaan menjadi kunci dalam analisis ekonomi dan perumusan kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut North (2000), kelembagaan merupakan aturan main yang terdiri dari norma, regulasi, dan struktur organisasi yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya kelembagaan dalam membentuk perilaku ekonomi, politik, dan sosial dalam sebuah sistem. North menyatakan bahwa kelembagaan tidak hanya mencakup lembaga formal seperti hukum dan pemerintah, tetapi juga mencakup norma, adat istiadat, dan praktik yang tidak tertulis yang menjadi bagian dari budaya suatu masyarakat. Lebih lanjut, North



menyatakan bahwa kelembagaan memainkan peran kunci dalam membentuk insentif bagi individu dan organisasi, dengan menciptakan

kerangka kerja yang memengaruhi pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Dalam pandangan North, kelembagaan juga dapat berubah seiring waktu melalui proses evolusi atau revolusi, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang konsep kelembagaan menjadi kunci dalam menganalisis dinamika sistem sosial dan ekonomi serta dalam merancang kebijakan yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan.

Menurut Ostrom (2010), konsep tentang kelembagaan melibatkan struktur organisasi, aturan, dan norma yang mengatur perilaku individu dalam suatu sistem. Ostrom menekankan pentingnya kelembagaan dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan efisien. Menurutnya, kelembagaan dapat berupa formal atau informal, dan dapat berasal dari tingkat lokal hingga tingkat nasional atau bahkan global. Ostrom mengidentifikasi beberapa prinsip penting yang mendukung keberhasilan kelembagaan dalam mengelola sumber daya alam, termasuk adanya partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan, pengakuan terhadap hak kepemilikan yang jelas, pengembangan aturan yang sesuai dengan kondisi lokal, serta adanya mekanisme pemantauan dan penegakan hukum yang efektif. Selain itu, Ostrom juga menyoroti pentingnya adanya pola kerjasama dan koordinasi di antara para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sumber



lam. Dengan pendekatan ini, Ostrom menekankan bahwa kelembagaan yang efektif adalah kunci untuk menciptakan sistem yang

berkelanjutan dan berdaya tahan dalam mengelola sumber daya alam yang terbatas.

Konsep tentang kelembagaan menurut Meier & Rauch (2005) dalam buku "Pembangunan: Teori, Kebijakan, dan Masalah" menyoroti peran penting institusi dalam proses pembangunan ekonomi. Mereka mengartikan kelembagaan sebagai aturan, norma, dan prosedur formal dan informal yang mengatur interaksi antarindividu, kelompok, dan lembaga dalam suatu masyarakat. Kelembagaan memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan kualitas kehidupan masyarakat serta memengaruhi efektivitas kebijakan pembangunan. Meier & Rauch menekankan bahwa kelembagaan yang baik, termasuk sistem hukum yang kuat, pemerintahan yang bersih, dan mekanisme pasar yang efisien, menjadi fondasi utama bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Mereka juga menyoroti pentingnya transformasi kelembagaan dalam mengatasi tantangan dan masalah pembangunan yang kompleks, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakstabilan ekonomi. Melalui analisis kelembagaan yang komprehensif, Meier & Rauch mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi yang berhasil memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan dan memperbaiki kelembagaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Drazen (2002), kelembagaan merupakan kumpulan norma,



dan struktur yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam sistem sosial atau ekonomi. Drazen menekankan bahwa

kelembagaan tidak hanya mencakup lembaga-lembaga formal seperti pemerintah dan peraturan hukum, tetapi juga norma-norma informal dan praktik-praktik yang telah terinternalisasi dalam masyarakat. Menurut Drazen, kelembagaan memainkan peran penting dalam membentuk dinamika ekonomi dan politik suatu negara. Kelembagaan memengaruhi distribusi kekuasaan, alokasi sumber daya, dan proses pengambilan keputusan di dalam suatu masyarakat. Drazen juga menyoroti bahwa perubahan kelembagaan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan politik suatu negara, karena kelembagaan menciptakan kerangka kerja untuk interaksi sosial dan pembangunan kebijakan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang kelembagaan menjadi penting bagi pembuat kebijakan dan peneliti dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas suatu masyarakat.

Farmer (2019) dalam karyanya "Ekonomi Kepemimpinan: Teori dan Aplikasi" menguraikan konsep kelembagaan sebagai struktur sosial yang memfasilitasi interaksi dan pengaturan aktivitas ekonomi dalam suatu masyarakat. Menurutnya, kelembagaan tidak hanya mencakup lembaga-lembaga formal seperti pemerintah dan peraturan hukum, tetapi juga norma-norma sosial, budaya, dan praktik-praktik yang memengaruhi perilaku ekonomi individu dan kolektif. Farmer menekankan bahwa kelembagaan memiliki peran kunci dalam membentuk dinamika ekonomi,



mereka menciptakan kerangka kerja yang mempengaruhi bilan keputusan ekonomi, alokasi sumber daya, dan distribusi hasil.

Selain itu, Farmer juga menyoroti pentingnya adaptasi dan evolusi kelembagaan dalam menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi, serta dalam mempromosikan inklusi dan keadilan dalam pembangunan ekonomi. Dalam pandangannya, kelembagaan tidaklah statis, tetapi terus berubah dan beradaptasi untuk memenuhi tuntutan zaman yang terus berkembang.

Konsep tentang kelembagaan menurut Achmad (2013) mencakup pemahaman mendalam tentang peran kelembagaan dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia. Achmad menggambarkan kelembagaan sebagai struktur, norma, dan aturan yang menjadi landasan bagi interaksi ekonomi, politik, dan sosial di dalam masyarakat. Menurutnya, kelembagaan tidak hanya terbatas pada institusi formal seperti pemerintah dan lembaga keuangan, tetapi juga mencakup norma, nilai, dan praktik yang terinternalisasi dalam perilaku masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, Achmad menekankan pentingnya kelembagaan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi hasil pembangunan yang adil. Ia juga mengakui bahwa dinamika kelembagaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan politik, perkembangan teknologi, dan interaksi dengan lingkungan global. Dengan memahami peran dan dinamika kelembagaan ini, Achmad mendorong untuk merancang kebijakan pembangunan yang



pada peningkatan kualitas kelembagaan, transparansi, litas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan

ekonomi Indonesia.

Selanjutnya berbicara tentang kelembagaan lokal terdapat beberapa ahli yang mengemukakan yaitu: Kelembagaan lokal menurut Hefner (2008) adalah sebuah kerangka pemahaman yang mendalami peran serta kelembagaan tradisional dalam membentuk dan mengelola kehidupan masyarakat lokal di berbagai konteks budaya. Hefner menggarisbawahi bahwa kelembagaan lokal tidak hanya berfungsi sebagai struktur sosial formal, tetapi juga sebagai sarana yang memfasilitasi interaksi sosial, penyelesaian konflik, pembangunan, dan pemeliharaan identitas budaya. Menurut Hefner, kelembagaan lokal memiliki daya tahan yang kuat terhadap perubahan sosial dan politik, serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika eksternal yang terjadi di sekitarnya. Melalui studinya, Hefner juga menyoroti peran penting agama dalam membentuk dan memperkuat kelembagaan lokal, baik sebagai sumber legitimasi maupun sebagai faktor penggerak dalam transformasi kelembagaan. Selain itu, Hefner juga menekankan pentingnya memahami konteks lokal dan dinamika internal masyarakat dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, konsep kelembagaan lokal menurut Hefner bukan hanya menjadi bagian integral dari identitas sosial dan budaya suatu masyarakat, tetapi juga menjadi kunci dalam memahami dinamika sosial, politik, dan pembangunan di tingkat lokal.



nurut Geertz (2014), konsep kelembagaan lokal merujuk pada sosial dan pola interaksi yang berkembang di tingkat lokal dalam

masyarakat pedesaan. Geertz menekankan pentingnya memahami kelembagaan lokal sebagai inti dari kehidupan sosial masyarakat pedesaan, di mana norma, nilai, dan praktik-praktik sosial menjadi terintegrasi dengan tata kehidupan sehari-hari. Konsep ini juga mencakup sistem hierarki dan otoritas yang diakui dan dihormati dalam konteks masyarakat pedesaan. Geertz menyoroti bahwa kelembagaan lokal tidak hanya berfungsi sebagai struktur organisasi formal, tetapi juga sebagai penyelenggara kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat pedesaan. Dalam pandangan Geertz, kelembagaan lokal merupakan penjaga kestabilan sosial dan pemelihara nilai-nilai budaya tradisional, sementara juga beradaptasi dengan perubahan zaman dan dinamika eksternal yang memengaruhi masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang kelembagaan lokal menjadi kunci untuk memahami identitas dan dinamika sosial di tingkat lokal dalam masyarakat pedesaan.

Menurut Koentjaraningrat (2008), konsep kelembagaan lokal merujuk pada berbagai struktur sosial, norma, dan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat tradisional di Indonesia. Dalam pandangannya, kelembagaan lokal memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal. Kelembagaan-kelembagaan ini sering kali didasarkan pada adat istiadat, tradisi, dan nilai-nilai budaya yang telah



yang selama berabad-abad. Koentjaraningrat menekankan bahwa lembaga lokal ini memiliki fleksibilitas yang tinggi dan mampu

beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam lingkungan sosial dan ekonomi. Selain itu, kelembagaan lokal juga dapat menjadi basis bagi pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam, menyelesaikan konflik, dan membangun solidaritas sosial. Namun demikian, Koentjaraningrat juga mencatat bahwa kelembagaan lokal sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi, yang dapat mengancam eksistensinya serta mengubah dinamika sosial dan budaya di tingkat lokal. Oleh karena itu, pemahaman dan pengakuan terhadap kelembagaan lokal menjadi penting dalam upaya pelestarian budaya dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kelembagaan lokal menurut Mubyarto (1992) mengacu pada sistem kelembagaan yang berakar pada nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi lokal yang ada dalam masyarakat desa di Indonesia. Menurutnya, kelembagaan lokal merupakan entitas yang memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal. Kelembagaan lokal sering kali terbentuk berdasarkan pola-pola adat, hukum adat, dan struktur sosial yang telah ada secara turun temurun dalam masyarakat. Mubyarto menyoroti bahwa kelembagaan lokal tidak hanya menjadi wadah untuk mengatur interaksi antarindividu, tetapi juga menjadi sarana untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Melalui kelembagaan lokal,



ikat desa dapat membangun solidaritas sosial, menyelesaikan internal, dan mencapai kesejahteraan bersama. Dalam konteks

pembangunan, Mubyarto menekankan pentingnya mengakomodasi kelembagaan lokal dalam perencanaan dan implementasi kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan realitas lokal.

Menurut van Bruinessen (2001), kelembagaan lokal mencakup kerangka kerja yang kompleks dan terkait erat dengan dinamika politik, agama, dan masyarakat di Indonesia. Van Bruinessen menyoroti pentingnya memahami kelembagaan lokal sebagai bagian integral dari struktur sosial yang ada di dalamnya, termasuk interaksi antara kekuatan politik formal dan informal, tradisi agama, serta sistem adat yang memengaruhi perilaku sosial dan politik masyarakat. Dalam konteks ini, kelembagaan lokal sering kali menjadi arena di mana terjadi negosiasi kekuasaan, penyelesaian konflik, dan penciptaan identitas kolektif. Van Bruinessen menekankan bahwa untuk memahami perubahan sosial dan politik di Indonesia, penting untuk memperhitungkan peran dan dinamika kelembagaan lokal dalam mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat.

Kelembagaan lokal menurut Winarno (2006) merujuk pada struktur dan sistem organisasi yang berakar di tingkat lokal atau masyarakat desa di Indonesia. Dalam pemahaman Winarno, kelembagaan lokal mencakup berbagai institusi sosial, norma, nilai, dan praktik-praktik yang dijalankan oleh masyarakat setempat. Kelembagaan lokal ini dapat berkaitan dengan

di aspek kehidupan, seperti pemerintahan lokal, pengaturan sumber daya alam, sistem adat dan hukum, serta mekanisme sosial ekonomi.



Selain itu, Winarno menyoroti pentingnya kelembagaan lokal dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, mempertahankan identitas budaya, dan mengatur hubungan sosial antarindividu dan kelompok dalam masyarakat desa. Melalui studi tentang kelembagaan lokal, Winarno berusaha untuk memahami dinamika sosial, politik, dan ekonomi di tingkat lokal serta peran pentingnya dalam pembangunan dan transformasi masyarakat desa di Indonesia.

Sebagaimana tergambar dalam bukunya "Politik Hukum Adat: Persoalan dan Penyelesaian di Indonesia": Menurut Hakim (2010), kelembagaan lokal merupakan sebuah konsep yang meliputi berbagai aspek dari kehidupan masyarakat adat di Indonesia. Ia menyoroti pentingnya hukum adat dalam mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan politik di dalam komunitas-komunitas tradisional. Hakim menekankan bahwa kelembagaan lokal seringkali berfungsi sebagai penjaga kearifan lokal dan identitas budaya suatu masyarakat, sementara juga dapat menjadi wadah untuk penyelesaian konflik dan sengketa di tingkat lokal. Dia menyoroti peran penting kepemimpinan adat dalam menjaga stabilitas dan harmoni di dalam masyarakat tradisional, serta menekankan perlunya mengakui dan menghormati hak-hak adat dalam kerangka hukum nasional. Hakim juga menyoroti tantangan dan konflik yang muncul ketika hukum adat bertemu dengan hukum nasional atau modern, serta pentingnya



ikan titik temu antara kedua sistem hukum ini untuk mencapai yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian,

konsep kelembagaan lokal menurut Hakim menekankan pentingnya memahami dan menghargai kearifan lokal dalam konteks pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

Kelembagaan lokal menurut Witteveen (1997) menyoroti peran penting institusi-institusi lokal dalam membentuk dan mempengaruhi kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Witteveen menekankan bahwa kelembagaan lokal tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan formal dalam masyarakat, tetapi juga mencakup norma-norma, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Witteveen, kelembagaan lokal mencerminkan pola-pola hubungan sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang di masyarakat setempat, yang sering kali didasarkan pada tradisi, adat istiadat, dan norma-norma yang telah ada sejak lama. Selain itu, kelembagaan lokal juga berperan sebagai wahana bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan kolektif. Dengan demikian, konsep kelembagaan lokal menurut Witteveen menyoroti kompleksitas dan signifikansi peran institusi-institusi lokal dalam menjaga stabilitas sosial, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat identitas budaya masyarakat di tingkat lokal.

2.8 Konsep Kelas Menengah (Middle Class)



Menurut Yuliantri dan Hutagaol (2016) dalam bukunya yang berjudul "Middle Ground: Konstruksi Kelas Menengah di Indonesia", konsep kelas menengah di Indonesia melibatkan konstruksi sosial yang kompleks

dan beragam. Mereka menggambarkan kelas menengah sebagai segmen masyarakat yang berada di antara kelas atas dan kelas bawah, dengan karakteristik ekonomi, sosial, dan budaya yang berbeda-beda. Kelas menengah tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendapatan, tetapi juga oleh keberadaan modal sosial, pendidikan, dan aspirasi serta gaya hidup yang cenderung modern. Selain itu, Yuliantri dan Hutagaol juga menyoroti bahwa konsep kelas menengah tidaklah statis, melainkan dinamis dan terus berubah seiring dengan perkembangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya memahami kompleksitas kelas menengah dalam konteks lokal, regional, dan global untuk mengembangkan kebijakan yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan dan inklusi sosial di Indonesia.

Menurut Bachriadi (2015), konsep kelas menengah tidak hanya mencakup dimensi ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek politik, pembangunan, dan perspektif sosial yang lebih luas. Bachriadi menguraikan bahwa kelas menengah adalah sebuah entitas sosial yang berada di tengah antara kelas atas dan kelas bawah, yang memiliki peran penting dalam dinamika politik dan pembangunan suatu negara. Dalam pandangannya, pembangunan kelas menengah dapat menjadi motor utama bagi pertumbuhan ekonomi, memperkuat stabilitas politik, serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Bachriadi juga menyoroti bagaimana



ktor politik, termasuk kebijakan publik, mempengaruhi
uhan dan karakteristik kelas menengah dalam konteks Indonesia.

Dalam analisisnya, Bachriadi menekankan pentingnya memahami dinamika dan peran kelas menengah dalam mendorong perubahan sosial dan politik yang positif dalam suatu masyarakat.

Konsep kelas menengah menurut Leo Agustino menyoroti peran pentingnya dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Dalam perspektifnya, kelas menengah tidak hanya merupakan kategori sosial atau ekonomi, tetapi juga merupakan agen perubahan yang signifikan dalam dinamika sosial dan politik negara. Agustino menekankan bahwa pertumbuhan kelas menengah menciptakan peluang baru dalam masyarakat, memungkinkan mobilitas sosial yang lebih besar dan menyebarkan manfaat ekonomi lebih merata. Namun, ia juga memperingatkan tentang tantangan yang dihadapi oleh kelas menengah, termasuk masalah kesenjangan ekonomi, ketergantungan pada sektor informal, dan kerentanan terhadap perubahan ekonomi global. Agustino menegaskan pentingnya kebijakan yang mendukung pertumbuhan kelas menengah yang inklusif dan berkelanjutan, serta perlunya reformasi struktural untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kelas menengah menurut Sukidin (2018) mengacu pada kelompok sosial yang berada di antara kelompok ekonomi yang lebih tinggi dan lebih rendah. Dalam perspektifnya, kelas menengah tidak hanya ditentukan oleh



ekonomi, tetapi juga oleh aspek sosial dan budaya. Sukidin memandang kelas menengah sebagai kelompok yang memiliki

kecukupan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak, namun juga memiliki keinginan untuk meningkatkan taraf hidup dan mobilitas sosial. Kelas menengah sering dianggap sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial, karena memiliki daya beli yang cukup untuk memicu aktivitas ekonomi dan berperan dalam menciptakan lapangan kerja. Selain itu, kelas menengah juga memiliki peran penting dalam pembentukan budaya dan nilai-nilai masyarakat, serta dalam proses demokratisasi dan partisipasi politik. Sukidin menekankan bahwa pengembangan kelas menengah yang kuat merupakan salah satu kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di suatu negara.

Menurut Suryahadi, Sumarto, dan Molyneaux (2014), kelas menengah melibatkan aspek kesejahteraan, pola konsumsi, dan mobilitas sosial di Indonesia. Mereka menyoroti bahwa kelas menengah bukan hanya sekadar kategori pendapatan, tetapi juga mencakup akses terhadap layanan dan barang konsumsi tertentu yang mencerminkan status sosial dan gaya hidup. Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan kelas menengah menjadi indikator penting bagi perkembangan ekonomi dan sosial negara ini. Studi mereka menekankan pentingnya memahami dinamika kelas menengah, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan dan mobilitas sosial di antara anggotanya. Melalui pemahaman ini, mereka berharap



menyediakan wawasan yang lebih dalam tentang peran dan dampak kelas menengah dalam transformasi sosial dan ekonomi Indonesia.

Menurut Ananta dan Arifin (2017) dalam bukunya yang berjudul "Kelas Menengah dalam Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Politik di Indonesia", konsep kelas menengah tidak hanya terbatas pada kriteria ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial dan politik. Mereka menguraikan bahwa kelas menengah merupakan segmen masyarakat yang memiliki akses yang cukup terhadap pendapatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi, sehingga mampu menjaga gaya hidup yang lebih baik daripada kelas bawah namun belum mencapai tingkat keamanan dan kekayaan yang dimiliki oleh kelas atas. Selain itu, Ananta dan Arifin menekankan bahwa kelas menengah juga memiliki peran penting dalam dinamika politik dan sosial suatu negara, karena mereka cenderung memiliki kecenderungan untuk mengikuti proses demokratisasi, menuntut hak-hak politik, serta turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kelas menengah tidak hanya mengacu pada indikator ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan politik dalam konteks pembangunan dan transformasi sosial di suatu negara.

Menurut Takashi dan Ken (2016) dalam buku mereka yang berjudul "Kelas Menengah dan Transformasi Sosial di Asia Tenggara", konsep kelas menengah merupakan fenomena yang penting dalam dinamika sosial dan ekonomi di wilayah Asia Tenggara. Mereka menggambarkan kelas



menengah sebagai kelompok sosial yang memiliki daya beli yang signifikan, akses terhadap pendidikan yang lebih baik, serta peran yang semakin

penting dalam politik dan ekonomi. Konsep ini mencerminkan pergeseran struktur sosial di wilayah tersebut, di mana kelas menengah menjadi semakin dominan dalam perekonomian dan memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk kebijakan publik. Selain itu, Shiraishi Takashi dan Arai Ken juga menyoroti peran kelas menengah dalam menggerakkan perubahan sosial, seperti peningkatan tuntutan akan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan partisipasi politik yang lebih aktif. Dalam konteks Asia Tenggara, kelas menengah tidak hanya menjadi indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi agen utama dalam mengubah lanskap sosial dan politik di wilayah tersebut.

Menurut Jahar (2019), kelas menengah merupakan fenomena sosial yang memiliki peran penting dalam dinamika perubahan sosial di Indonesia. Dalam karyanya, Jahar menggambarkan kelas menengah sebagai sebuah kelompok sosial yang memiliki tingkat pendapatan dan kekayaan di atas rata-rata nasional, namun belum mencapai taraf kekayaan yang dapat dianggap sangat berlebihan. Kelas menengah sering kali didefinisikan oleh keberadaan sumber daya ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar serta memberikan akses terhadap kegiatan ekonomi, pendidikan, dan budaya yang lebih luas. Jahar juga menyoroti peran kelas menengah dalam membentuk nilai-nilai sosial, gaya hidup, dan aspirasi politik di masyarakat, yang dapat berkontribusi pada transformasi sosial



ih luas. Menurut Jahar, pemahaman yang mendalam tentang kelas menengah sangat penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan

yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia.

2.9 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan Suku Kamoro Kabupaten Mimika dapat dikemukakan sebagai berikut:

Dalam penelitiannya yang berjudul "Dinamika Industrialisasi di Indonesia: Implikasi terhadap Kepemimpinan Adat", Prof. Dr. Bambang Sudibyo (2015) mengungkapkan bahwa industrialisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks kepemimpinan adat. Melalui analisis mendalam, Sudibyo menyoroti bagaimana masuknya industri ke dalam suatu daerah sering kali menggeser peran dan otoritas pemimpin adat tradisional. Hal ini terjadi karena industrialisasi membawa perubahan dalam nilai-nilai ekonomi, sosial, dan politik, yang pada gilirannya mempengaruhi dinamika kekuasaan lokal. Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa tantangan terbesar yang dihadapi oleh kepemimpinan adat adalah upaya untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut tanpa kehilangan identitas budaya dan otonomi lokal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang dalam tentang bagaimana industrialisasi berdampak pada struktur kekuasaan tradisional di Indonesia, serta menyoroti perlunya upaya kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat lokal untuk memastikan kelangsungan dan integrasi yang harmonis antara modernitas



isi dalam kepemimpinan adat.

idi Dr. I Made Arnawa (2018) tentang transformasi kepemimpinan

adat dalam konteks proses industrialisasi di daerah perkotaan Indonesia menyoroti dinamika kompleks antara tradisi lokal dan modernitas ekonomi. Melalui penelitian yang mendalam, Arnawa menemukan bahwa proses industrialisasi di daerah perkotaan Indonesia telah menghadirkan tantangan signifikan bagi struktur kepemimpinan adat. Berdasarkan data empiris dan analisisnya, Arnawa mengungkapkan bahwa banyak elemen tradisional dalam kepemimpinan adat mulai mengalami penurunan pengaruhnya seiring dengan berkembangnya industri dan urbanisasi. Namun demikian, Arnawa juga menemukan bahwa ada upaya dari komunitas lokal untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini, dengan beberapa elemen kepemimpinan adat mengadopsi strategi baru untuk tetap relevan dalam konteks yang terus berubah. Studi ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana dinamika industrialisasi memengaruhi struktur sosial-tradisional di Indonesia, serta upaya masyarakat untuk menjaga warisan budaya mereka dalam menghadapi arus modernisasi.

Studi yang dilakukan oleh Dr. Maria Endo Mahendra (2020) bertujuan untuk menyelidiki dinamika industrialisasi dan perubahan sosial yang terjadi di Kalimantan Barat, khususnya dalam konteks transformasi kepemimpinan adat. Dalam penelitiannya, Mahendra menyoroti dampak industrialisasi terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat setempat, dengan fokus pada bagaimana kepemimpinan adat mengalami transformasi sebagai



terhadap perubahan tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dan sus, penelitian ini mengungkap bagaimana tradisi kepemimpinan

adat beradaptasi dengan masuknya industri dan bagaimana perubahan ekonomi, politik, dan sosial mempengaruhi peran dan otoritas pemimpin adat dalam masyarakat Kalimantan Barat. Temuan penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang kompleksitas interaksi antara industrialisasi, perubahan sosial, dan dinamika kepemimpinan adat di wilayah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. I Wayan Ardika (2017) mengungkapkan perubahan signifikan dalam dinamika kepemimpinan adat di Pulau Jawa seiring dengan proses industrialisasi yang terjadi. Melalui pendekatan etnografi dan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat setempat, Ardika mengidentifikasi bahwa industrialisasi telah memberikan dampak yang kompleks terhadap struktur sosial tradisional, termasuk sistem kepemimpinan adat. Menurut peneliti ini, industrialisasi telah menyebabkan pergeseran dalam pola kekuasaan dan otoritas di komunitas-komunitas adat, di mana nilai-nilai dan norma-norma tradisional seringkali harus beradaptasi atau bahkan dikalahkan oleh tuntutan ekonomi dan politik modern. Meskipun demikian, Ardika juga mencatat bahwa beberapa elemen kepemimpinan adat tetap bertahan, terutama di lingkungan pedesaan yang masih kuat dalam menjaga tradisi lokal dan nilai-nilai budaya. Kesimpulan penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas transformasi sosial yang terjadi di tengah-



rus industrialisasi di Pulau Jawa.

lam penelitiannya yang berjudul "Dampak Industrialisasi terhadap

Struktur Kepemimpinan Adat di Masyarakat Suku Dayak Kalimantan," Dr. Rini Setiowati (2016) menyelidiki dampak dari proses industrialisasi terhadap struktur dan peran kepemimpinan adat di kalangan masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Melalui pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dan observasi partisipatif, penelitian ini menyoroti pergeseran yang terjadi dalam dinamika sosial masyarakat Dayak seiring dengan masuknya industrialisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industrialisasi telah memicu transformasi signifikan dalam struktur sosial dan politik masyarakat Dayak, termasuk dalam sistem kepemimpinan adat mereka. Meskipun masih memegang peranan penting dalam masyarakat, peran kepemimpinan adat menghadapi tantangan baru karena berkembangnya ekonomi pasar dan penetrasi nilai-nilai kapitalis. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana industrialisasi telah memengaruhi dinamika sosial dan politik di kalangan masyarakat suku Dayak Kalimantan, khususnya dalam konteks struktur kepemimpinan adat mereka.

Studi yang dilakukan oleh Prof. Dr. Johanis Subrata bertujuan untuk mengeksplorasi peran kepemimpinan adat dalam menghadapi tantangan industrialisasi, dengan fokus pada studi kasus di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan adat masih memegang peranan penting dalam memediasi hubungan antara



...kat lokal dan proses industrialisasi. Meskipun terdapat tekanan dari ...angan industri, kepemimpinan adat tetap menjadi sumber

legitimasi dan pengambilan keputusan dalam komunitas lokal. Kepemimpinan adat memainkan peran penting dalam menjaga nilai-nilai tradisional dan keberlanjutan lingkungan hidup dalam menghadapi dampak negatif dari industrialisasi, sambil secara proaktif beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi. Studi ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana tradisi dan inovasi dapat bersinergi dalam menghadapi perubahan yang dibawa oleh industrialisasi, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dengan pelestarian nilai-nilai lokal dan lingkungan.

Dalam penelitiannya, Dr. Made Wirawansyah (2017) meneliti transformasi kepemimpinan adat di Pulau Sumbawa dalam konteks perubahan sosial ekonomi yang disebabkan oleh proses industrialisasi. Melalui pendekatan antropologis, penelitian ini mengungkap bagaimana perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial masyarakat setempat telah mempengaruhi peran dan otoritas pemimpin adat. Wirawansyah menyoroti bagaimana adanya pergeseran dalam pola kehidupan masyarakat lokal, terutama dalam hal pekerjaan, pendidikan, dan nilai-nilai budaya, telah membawa dampak signifikan terhadap cara kepemimpinan adat diakui dan dijalankan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana industrialisasi telah menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi dinamika sosial dan struktur kekuasaan di Pulau Sumbawa,



implikasinya terhadap institusi-institusi tradisional seperti kepemimpinan adat.

Penelitian Dr. I Gusti Putu Diva Awatara mengenai dinamika industrialisasi dan perubahan kepemimpinan adat, dengan studi kasus di daerah pedesaan Jawa Tengah, menyoroti dampak industrialisasi terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat lokal. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengungkap bagaimana transformasi ekonomi dan sosial yang diinduksi oleh industrialisasi telah mempengaruhi pola kepemimpinan adat di pedesaan Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industrialisasi telah membawa perubahan signifikan dalam hierarki sosial dan struktur kekuasaan tradisional. Kepemimpinan adat yang sebelumnya berbasis pada norma-norma budaya lokal dan sistem nilai tradisional, kini menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan dinamika ekonomi modern dan kebutuhan sosial masyarakat pedesaan. Dalam konteks ini, terjadi penyesuaian dan transformasi dalam peran dan legitimasi pemimpin adat, di mana aspek-aspek seperti keterbukaan, keterampilan manajerial, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan menjadi semakin penting dalam mempertahankan relevansi kepemimpinan adat. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas interaksi antara industrialisasi dan budaya lokal, serta menyoroti perlunya pendekatan yang holistik dalam mengelola perubahan sosial yang diinduksi oleh proses industrialisasi.

Tebaiy (2017), melakukan penelitian dengan metode observasi dan



ara terhadap responden kunci sebanyak 10 orang, mereka
tan masyarakat asli Kampung Omawita dan Fanamo yang

memanfaatkan sumber daya perikanan berdasarkan kearifan lokal Suku Kamoro. Hasil studinya menunjukkan bahwa terdapat 5 praktek kearifan lokal yaitu penggunaan alat tangkap ikan, alat pengumpul kerang, pemilihan jenis mangrove sebagai habitat bagi tambelo, persepsi nilai gizi tambelo dan cara pengemasan tradisional kepiting bakau. Kearifan lokal menjadi salah satu komponen yang menunjang keberlangsungan kehidupan suatu komunitas masyarakat dan keberlanjutan sumber daya. Masyarakat Suku Kamoro memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan terdokumentasi dalam praktek kearifan lokal.

Paramma (2013), Dalam penelitiannya bertujuan untuk menyelidiki dan menjelaskan bagaimana keterlibatan PT Freeport dalam meningkatkan pembangunan sumber daya pendidikan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Asliiuku Amungme dan Kamoro di Kabupaten Mimika, Papua. Tujuan penelitian mencakup analisis terhadap dampak positif dan negatif dari kehadiran PT Freeport di wilayah tersebut, dengan fokus pada perkembangan ekonomi dan pendidikan masyarakat dua suku tersebut. Penulis menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran PT Freeport Amerika Serikat di Kabupaten Mimika telah menghasilkan perubahan positif dan negatif. Di satu sisi, terjadi peningkatan dalam bidang ekonomi dan pendidikan masyarakat



me dan Kamoro. Namun, di sisi lain, keberadaan perusahaan it juga menyebabkan konflik, terutama dalam hal adat dan hak

kepemilikan ulayat, serta ketidakadilan ekonomi dan pendidikan. Proses pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat secara penuh menciptakan ketegangan vertikal dan horizontal antara marga, etnis, atau suku.

Erwinskyah (2022) dalam hasil penelitiannya berujuan untuk mengkaji konsekuensi dari berbagai kebijakan agraria dan program pembangunan terhadap masyarakat Kamoro di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi dampak dari aktivitas pertambangan FI, yang menyebabkan pemindahan masyarakat Kamoro dari gaya hidup nomaden di tanah adat mereka ke pemukiman permanen. Pemukiman permanen ini memperkenalkan mereka pada sistem pertanian intensif, terutama melalui Program Desa Tanam Sago (SPH/DST) yang menerapkan manajemen pertanian sago modern. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, yang menghasilkan data primer. Data sekunder diperoleh dari arsip dan penelusuran dokumen, sementara data spasial diperoleh dari citra Landsat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program DST membawa konsekuensi perubahan sosio-kultural bagi masyarakat Kamoro. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian terhadap organisasi sosial, mata pencaharian, dan



olaan sumber daya alam. Runtuhnya sistem produksi, reproduksi, asumsi masyarakat Kamoro disebabkan oleh alienasi budaya hidup

tradisional yang bergantung pada ketersediaan sumber daya alam. Akibatnya, masyarakat Kamoro mengalami keterbelakangan sebagai dampak dari perubahan ini.

AKAS (2010). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat Suku Amungme dan Suku Kamoro terhadap manfaat program dana bergulir PT. Freeport Indonesia yang disalurkan melalui LPMK. Metode penelitian yang digunakan adalah perbandingan persepsi antara kedua kelompok masyarakat tersebut, yaitu Suku Amungme dan Suku Kamoro. Data diperoleh melalui kuesioner dan wawancara dengan responden, serta data sekunder dari LPMK. Metode analisis yang diterapkan melibatkan Skala Likert untuk mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap program dan Mann-Whitney Test untuk menguji perbedaan persepsi antara dua kelompok. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan program dana bergulir berhasil membentuk persepsi positif dalam masyarakat Suku Amungme dan Suku Kamoro terkait manfaat program tersebut. Persepsi yang muncul adalah bahwa program ini memberikan manfaat yang nyata, dengan identifikasi tiga manfaat utama: terciptanya kesempatan usaha, dukungan permodalan, dan terbentuknya lapangan pekerjaan. Uji beda menggunakan Mann-Whitney Test menunjukkan adanya perbedaan persepsi yang signifikan antara penerima bantuan program dana bergulir dari Suku Amungme dan Suku



c. Hasil ini, dengan nilai z sebesar -2,928 dan nilai asymptotic ance (2-tailed) sebesar 0,003, mengindikasikan bahwa perbedaan

persepsi antara kedua kelompok masyarakat tersebut signifikan secara statistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dana bergulir memiliki dampak yang berbeda pada persepsi masyarakat Suku Amungme dan Suku Kamoro, meskipun secara umum, keduanya merasakan manfaat dari program tersebut.

Munawaroh & Tumbel (2017). Dalam hasil penelitiannya didasarkan pada tujuan untuk mengevaluasi peran Institut Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMMAK) dalam pelaksanaan Program Kewirausahaan serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat pribumi setelah dilakukan pengembangan kewirausahaan oleh LPMMAK. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan fokus pada pengumpulan data di kantor LPMMAK di Kabupaten Mimika, Papua. Data yang digunakan berasal dari dua jenis, yaitu data sekunder eksternal dan data sekunder internal. Teori yang mendasari penelitian ini mencakup konsep peran lembaga pembangunan masyarakat dalam melaksanakan program kewirausahaan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi. Analisis dilakukan terutama terkait pelaksanaan program dari pelatihan hingga pembiayaan usaha ekonomi produktif, dengan mempertimbangkan stabilitas keuangan PT Freeport Indonesia sebagai penyumbang dana utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LPMMAK berhasil dalam mencapai

ya, peran dan dampaknya mengalami penurunan signifikan akibat stabilan PT Freeport Indonesia, yang mengakibatkan pemotongan



dana sebesar 40%. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat masih terbatas karena kemampuan masyarakat dalam mengubah kondisi mereka masih terbatas, meskipun berbagai solusi telah disediakan oleh LPMK, namun diterima dengan keterbatasan. Dengan demikian, penelitian ini menyarankan agar masyarakat lebih proaktif dalam mengembangkan potensi kewirausahaan yang dikelola oleh LPMK untuk mencapai kesejahteraan yang lebih holistik.

2.10 Kerangka Pemikiran

Penelitian tentang dinamika industrialisasi dalam konteks transformasi kepemimpinan masyarakat adat Kamoro di Mimika, Papua, memerlukan pemahaman yang holistik terhadap beberapa konsep kunci. Pertama, industrialisasi mengacu pada proses pengembangan sektor industri dalam suatu wilayah, yang dapat melibatkan perubahan signifikan dalam struktur ekonomi, sosial, dan politik. Transformasi, dalam konteks ini, mengacu pada perubahan yang terjadi sebagai hasil dari industrialisasi, termasuk pergeseran budaya, nilai-nilai, dan cara hidup masyarakat adat Kamoro dalam menghadapi modernisasi. Modernisasi adalah proses di mana masyarakat mengadopsi teknologi, ideologi, dan praktik-praktik baru yang sering kali terkait dengan industrialisasi. Kepemimpinan memainkan peran kunci dalam memandu dan mengelola perubahan yang terkait dengan industrialisasi, sementara kepemimpinan lokal mencakup pemimpin-pemimpin dari dalam masyarakat adat Kamoro yang berada dalam posisi untuk memengaruhi arah dan dampak dari transformasi tersebut.



Kelembagaan, baik tingkat nasional maupun lokal, mencakup struktur politik, ekonomi, dan sosial yang memfasilitasi atau menghambat proses industrialisasi dan transformasi kepemimpinan. Kelembagaan lokal, khususnya, menyoroti peran lembaga-lembaga tradisional dan adat dalam mengatur kehidupan masyarakat adat Kamoro. Dengan memahami interaksi kompleks antara konsep-konsep ini, penelitian tentang dinamika industrialisasi di Mimika, Papua, dapat menggambarkan bagaimana perubahan ekonomi dan sosial yang terkait dengan industrialisasi mempengaruhi struktur kepemimpinan tradisional dan lembaga-lembaga lokal dalam masyarakat adat Kamoro.

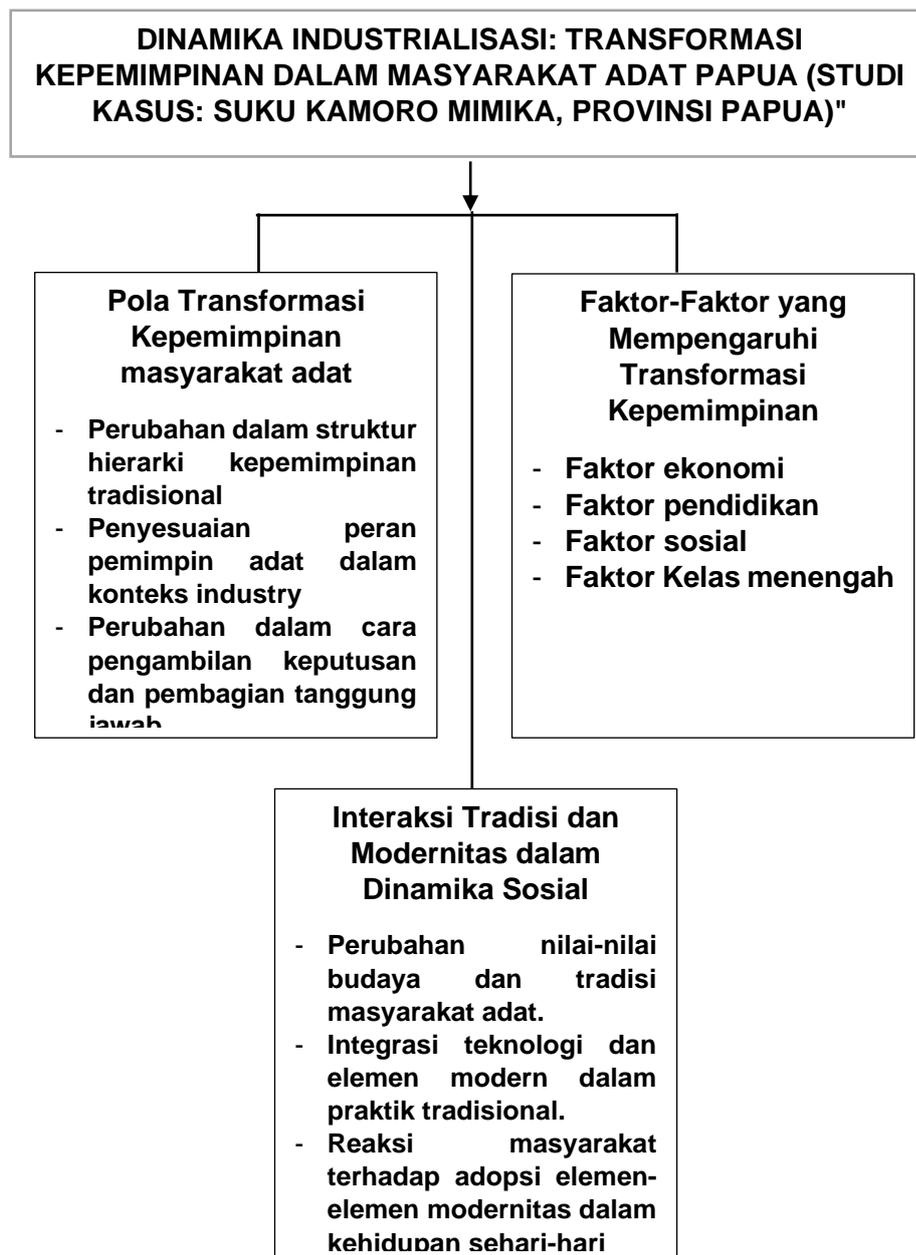
Terkait dengan hal tersebut, dengan mempertimbangkan implikasi praktis dari dinamika industrialisasi dan transformasi kepemimpinan bagi masyarakat adat Kamoro di Mimika, Papua. Pertama, perlu memahami bagaimana industrialisasi, yang sering kali didorong oleh kepentingan ekonomi luar, dapat mempengaruhi keberlangsungan lingkungan dan sumber daya alam yang penting bagi masyarakat adat Kamoro.

Selain itu, transformasi kepemimpinan dalam masyarakat adat Kamoro dapat mencerminkan pergeseran dalam cara pengambilan keputusan, pengaturan konflik, dan pemeliharaan warisan budaya mereka di tengah modernisasi yang cepat. Kemudian, juga mempertimbangkan dinamika interaksi antara kepemimpinan lokal dan kelembagaan tradisional



pemerintah pusat dan korporasi yang terlibat dalam proses industrialisasi di wilayah tersebut. Hal ini mencakup analisis tentang G250

bagaimana kebijakan nasional dan internasional, serta investasi sektor swasta, mempengaruhi kontrol lokal atas sumber daya dan pengambilan keputusan di tingkat masyarakat adat.



Gambar 2.1 Gambar Skema Kerangka Pikir

